2025

LAPORAN
KINERJA

DP2KBP2

PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai, dan 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja yang harus di capai sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 6 sasaran strategis dan dengan 6 indikator kinerja dan 6 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100%
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Nindya	100%
		1.3	Prevalensi KB Aktif	80,50%	80,50%	100%
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,50%	89,86%	122%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,60 (A)	85,62 (A)	101%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,50 %	95,88 %	99,36%
		1.3	Index Profesionalitas ASN	85,50 (Tinggi)	87,40 (Tinggi)	102 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	100 %

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07	80,50	100,5%
Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15	89,45 %	101 %
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100%	100 %	100 %
Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100%	100 %	100 %
Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78 %	12,73 %	108 %
Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60	85,62	101 %

Kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 19.127.534.787,00 atau 95,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 19.949.199.675,00.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul i
Ikhtisar Eksekutif ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN 8

I.1 Latar Belakang 8
I.2 Gambaran Umum 9
I.3 Isu-isu Strategis 11
I.4 Sistematika Penulisan 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

II.1 Penjenjangan Strategis 18
II.2 Indikator Kinerja Utama 34
II.3 Perjanjian Kinerja 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 41

III.1 Pengukuran Kinerja 41
III.2 Analisis Kinerja 43
III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 91
III.4 Perbandingan Nilai SAKIP Pemda dengan DP2KBP2 92
III.5 Prestasi Kerja Lainnya 93
III.6 Akuntabilias Anggaran 95

BAB IV PENUTUP 97

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 : SDM DP2KBP2 (hal:9)
Tabel 1.2 : Struktur Organisasi (hal:11)
Tabel 1.3 : Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPTD PPA Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (hal:14)
Tabel 2.1.A : Matrikas Penjenjangan Strategis Tahun 2021 – 2025 (hal:18)
Tabel 2.1.B : Matrikas Penjenjangan Strategis Tahun 2025 – 2029 (hal:26)
Tabel 2.2 : IKU DP2KBP2 Periode 2021 – 2026 (hal:36)
Tabel 2.3 : IKU DP2KBP2 Periode 2025 – 2029 (hal:37)
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 (hal:38)
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 (hal:39)
Tabel 3.1 : Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (hal:43)
Tabel 3.2.a : Analisa capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi TA 2025 periode perencanaan Tahun 2021 – 2026 (hal:45)
Tabel 3.2.a.1 : APE menurut kategori nilai Tahun 2020 s/d 2025 (hal:47)
Tabel 3.2.a.2 : KLA menurut kategori nilai Tahun 2020 sd 2025 (hal:50)
Tabel 3.2.a.3 : Pencapaian peserta KB Aktif di Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (hal:52)
Tabel 3.2.a.4 : Pencapaian peserta KB Aktif per mix kotrasepsi (hal:52)
Tabel 3.2.a.5 : Perbandingan prevalensi KB Tahun 2020 sd 2025 (hal:53)
Tabel 3.2.a.6 : Presentase kelompok ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yang aktif (hal:55)
Tabel 3.2.a.7 : Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Mojokerto (hal:56)
Tabel 3.2.a.8 : Nilai SAKIP DP2KBP2 Tahun 2021 sd 2025 (hal:57)
Tabel 3.2.a.9 : Nilai Presentase LRA Tahun 2021 sd 2025 (hal:59)
Tabel 3.2.a.10 : Proyeksi RLA (hal:60)
Tabel 3.2.a.11 : Nilai IP ASN Tahun 2021 sd 2025 (hal:11)
Tabel 3.2.b : Analisa capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2025 periode perencanaan 2025 – 2029 (hal:66)
Tabel 3.2.b.1 : Pencapaian peserta KB Aktif di Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (hal:67)
Tabel 3.2.b.2 : Pencapaian peserta KB Aktif per mix kotrasepsi (hal:68)
Tabel 3.2.b.3 : Perbandingan prevalensi KB Tahun 2020 sd 2025 (hal:69)
Tabel 3.2.b.4 : Prevalensi KRS yang di dampingi Tahun 2025 (hal:71)
Tabel 3.2.b.5 : Korban perempuan yang terselesaikan Tahun 2025 (hal:75)
Tabel 3.2.b.6 : Korban anak yang terselesaikan Tahun 2025 (hal:77)
Tabel 3.2.b.7 : Perangkat Daerah yang telah ARG Tahun 2025 (hal:78)
Tabel 3.2.c : IKU periode 2021 – 2025 berdasarkan renstra (hal:82)
Tabel 3.2.d : IKU periode 2025 – 2029 berdasarkan renstra (hal:83)
Tabel 3.2.e : Perbandingan Realisasi Kinerja Program DP2KBP2 Tahun 2021 – 2025 berdasarkan Renstra (hal:87)
Tabel 3.2.f : Perbandingan Realisasi Kinerja Program DP2KBP2 Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Renstra (hal:88)
Tabel 3.3.1 : Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan sekitar/Pemda/ Nasional (hal:91)
Tabel 3.4.1 : Perbandingan Nilai SAKIP Pemda dan DP2KBP2 Tahun 2025 (hal:92)
Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran Tahun 2025 (hal:95)
Tabel 3.6 : Perbandingan capaian kinerja dengan anggaran Tahun 2025 (hal:96)

Daftar Gambar

Gambar 1.2 : Bagan Struktur Organisasi DP2KBP2 (hal:11)
Gambar 3.2.a.1 : APE menurut kategori nilai Tahun 2020 s/d 2025 (hal:48)
Gambar 3.2.a.2 : KLA menurut kategori nilai Tahun 2020 sd 2025 (hal:50)
Gambar 3.2.a.4 : Pencapaian peserta KB Aktif per mix kotrasepsi (hal:53)
Gambar 3.2.a.5 : Perbandingan prevalensi KB Tahun 2020 sd 2025 (hal:54)
Gambar 3.2.a.7 : Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Mojokerto Keluarga (hal:56)
Gambar 3.2.a.8 : Nilai SAKIP DP2KBP2 Tahun 2021 sd 2025 (hal:58)
Gambar 3.2.a.9 : Nilai Presentase LRA Tahun 2021 sd 2025 (hal:59)
Gambar 3.2.a.11 : Nilai IP ASN Tahun 2021 sd 2025 (hal:64)
Gambar 3.2.a.12 : Barkot UPTD PPA (hal:65)
Gambar 3.2.b.2 : Pencapaian peserta KB Aktif per mix kotrasepsi (hal:68)
Gambar 3.2.b.3 : Perbandingan prevalensi KB Tahun 2020 sd 2025 (hal:69)
Gambar 3.2.b.4.a : Catin (hal:72)
Gambar 3.2.b.4.b : Ibu hamil (hal:72)
Gambar 3.2.b.4.c : Pasca persalinan (hal:73)
Gambar 3.2.b.4.d : Balita 0 – 24 bulan (hal:73)
Gambar 3.2.b.4.e : Total Pendampingan (hal:74)
Gambar 3.4.1 : Perbandingan Nilai SAKIP Pemda dengan DP2KBP2 (hal:92)

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja program secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka mewujudkan visi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanadan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah :

a. Perpres 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

b. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan akuntabilatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada pihak-pihak yang memberi amanah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

c. Pengertian Laporan Kinerja

Laporan kinerja adalah dokumen pertanggungjawaban yang merangkum capaian dan hasil kerja suatu individu, organisasi, atau instansi pemerintah dalam periode tertentu, membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasinya untuk menunjukkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Dokumen ini berisi informasi tentang pencapaian target, penggunaan anggaran. Gambaran Umum

1.2. Gambaran Umum

a. Sumber Daya Manuasia

Sumber daya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
(Kondisi Per Desember Tahun 2025)

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	30 Orang terdiri dari			
	Es. II : 1, Es. : III 3 , Es. IV : 0, JFT : 10, JFU : 16			
1	Jumlah Pegawai PNS	10	20	30

2	**Tingkat Pendidikan PNS**	**10**	**20**	**30**
	a. SD			
	b. SLTP			
	c. SLTA		1	1
	d. Diploma - 2 (D-2)			
	e. Diploma - 3 (D-3)			
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	6	15	21
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	2	4	6
	h. Doktor (S-3)	2		2
3	**Golongan Kepangkatan PNS**	**10**	**20**	**30**
	a. III/a	3	9	11
	III/b		2	2
	III/c	1	2	4
	III/d	3	3	6
	d. IV/a	2	4	6
	IV/b			
	IV/c	1		1
	IV/d			
4	**PNS menurut Agama**	**10**	**20**	**30**
	a. Islam	10	20	30
	b. Protestan			
5	**PNS Menurut Golongan Umur**	**10**	**20**	**30**
	a. < 30 Tahun		6	6
	b. 30 - 39 Tahun		3	3
	c. 40 - 49 Tahun	**2**	3	5
	d. 50 - 55 Tahun	6	5	11
	e. > 55 Tahun	2	3	5
6	**Tipe Pegawai**	**10**	**20**	**30**
	a. Pejabat Struktural	3	1	4
	b. Jabatan Fungsional Tertentu	3	7	10
	c. Fungsional Umum	4	12	16

2.a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelayanan publik dan tata laksana, perencanaan, pelaporan kinerja dan reformasi birokrasi.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2

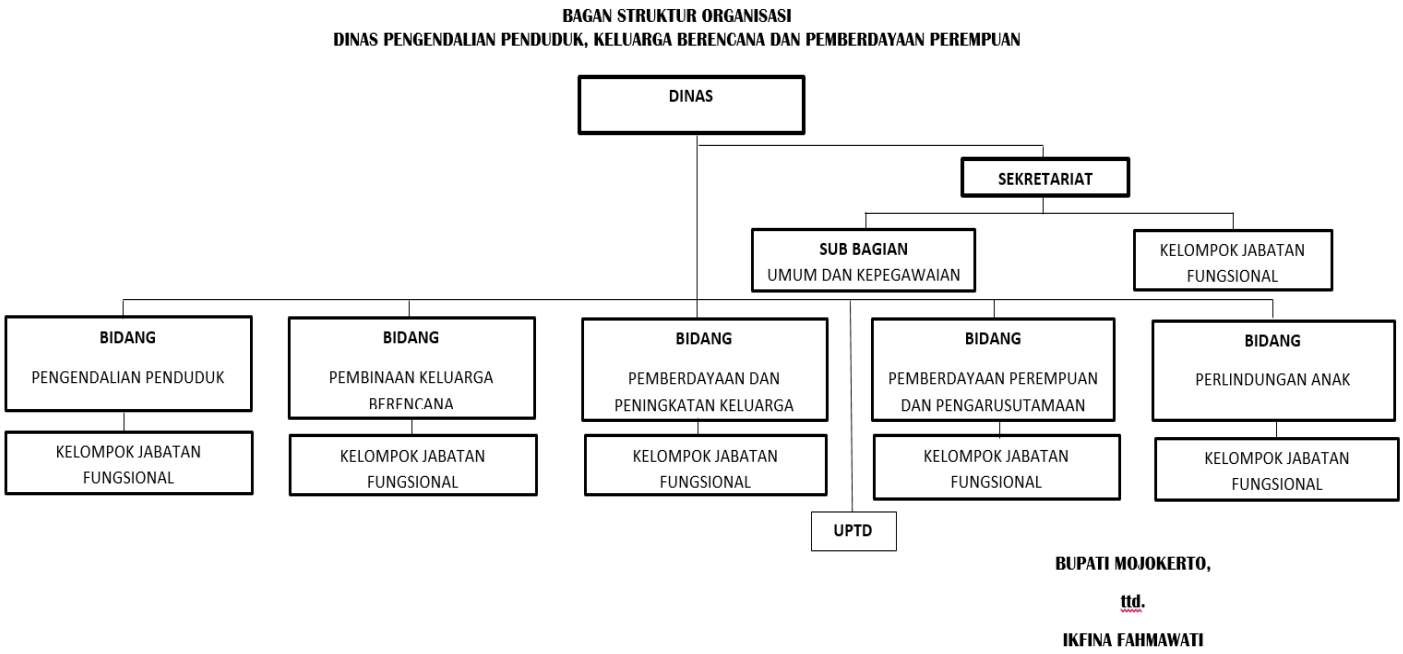

1.3. Isu-isu Strategis

Disadari sepenuhnya dalam era otonomi daerah, walaupun tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara umum telah dilaksanakan sepenuhnya namun dalam tahun 2025 hal-hal yang masih memerlukan perhatian secara khusus antara lain :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terutama petugas lapangan KKBPK (Koordinator dan Penyuluh KKBPK) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.

3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya
4. Keberadaan Kampung KB yang relatif masih baru memerlukan perhatian khusus agar keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam memberikan informasi dan edukasi tentang Program KKBPK.
5. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.
2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
3. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD dan banyak yang merangkap menjadi kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman serta kinerja terhadap program.
4. Belum semua kader BKR dan PIK R memahami tentang program Genre terutama triad KRR (pernikahan dini, seks pra nikah, napza) sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
5. Pemahaman keluarga tentang pendidikan balita serta kesejahteraan dan kesehatan lansia masih kurang sehingga kegiatan BKB dan BKL kurang optimal.
6. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian

kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal
2. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan
3. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada
5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal.
6. Masih kurangnya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada mitra kerja.
7. Belum adanya data terpilah tentang gender.

Adapun faktor pendoring pencapaian kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan Organisasi :

1. Mempunyai tenaga Fungsional sampai dengan tingkat Desa (Penyuluh KB)
2. Mempunyai Kader sampai di tingkat dusun berjumlah 1.828 orang terdiri dari 304 PPKBD dan 1.524 Sub PPKBD
3. Mempunyai Tim Pendamping Keluarga tingkat desa/kelurahan berjumlah 2.586 Orang
5. Mendapat bantuan alat kontrasepsi dari anggaran APBN
6. Mempunyai Kendaraan dinas roda dua untuk operasional Penyuluh KB 6. Mempunyai mobil keliling penerangan KB untuk KIE secara visual
7. Mempunyai Mobil Akseptor untuk alat trasportasi calon akseptor KB 8. Setiap Kecamatan didukung minimal 2 buah laptop/PC dan sarana KIE
8. 18 Kecamatan sudah dibangun Balai Penyuluhan KB
9. Mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gugus tugas PPA di Desa
10. Mempunyai Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) P2TP2A
11. Mempunyai Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) P2TP2A

12. Mempunyai UPTD PPA UPTD PPA sebagai tempat layanan pengaduan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar, namun Pemerintah Daerah harus menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan dan anak agar korban mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan dari UPTD PPA jika ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan.

Adapun kasus yang sudah melapor ke P2TP2A/UPTD PPA dan telah di tangani pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPTD PPA
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

No	Bentuk Kekerasan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Fisik	2	1	0	0	0	1	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	11	5
2	Psikis	0	0	3	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5
3	Seksual	0	0	0	3	0	1	0	1	0	4	0	2	1	2	1	2	0	1	3	1	1	0	0	1	6	18
4	Eksploitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
7	Kekerasan Lainnya	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	6
	Jumlah	2	1	4	4	0	3	3	2	1	6	2	2	2	3	1	4	0	2	4	4	2	3	3	2	24	36
		3		**8**		**3**		**5**		**7**		**4**		**5**		**5**		**2**		**8**		**5**		**5**		**60**	

Rekap Kasus sampai dengan Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Jatirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
2	Gondang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
3	Pacet	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
4	Trawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Ngoro	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
6	Pungging	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
7	Kutorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mojosari	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	3	4
9	Dlanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
10	Bangsal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	Puri	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3
12	Trowulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2
13	Sooko	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4
14	Gedeg	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15	Kemlagi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
16	Jetis	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4
17	Dawarblandong	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
18	Mojoanyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	Jumlah	2	1	4	4	0	3	3	2	1	6	2	2	2	3	1	4	0	2	4	4	2	3	3	2	24	36
		3		**8**		**3**		**5**		**7**		**4**		**5**		**5**		**2**		**8**		**5**		**5**		**60**	

Sedangkan Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. *Unmed Need* masih Tinggi.
2. KB MKJP Masih Rendah

3. Tingginya Stunting di Kabupaten Mojokerto.
4. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
5. Banyaknya Kasus Pernikahan Anak.
6. Meningkatnya pelecehan seksual dan tindak kekerasan (KDRT) pada anak.
7. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, ekonomi dan pembangunan.
8. Meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi, untuk mencapai kesetaraan gender, maka harus ada komitmen yang tinggi dari seluruh OPD.
9. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
10. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
11. Meningkatkan usia perkawinan ideal.
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
13. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok ketahanan keluaraga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS).
14. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
15. Meningkatnya kualitas advokasi dan KIE KB lewat media.
16. Bertambahnya kualitas data yang cepat, tepat dan akurat.

I.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

A. BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

B. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

C. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang

mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

D. BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

1. A. Rencana Strategis 2021-2025

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021- 2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi.

a. Visi

Visi Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2021 - 2025 yakni : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"**

b. Misi

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu**:**

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera adalah selaras dengan visi Bupati terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur dengan misi yaitu : **Misi 1 "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan"**

c. Tujuan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : **"Meningkatkan kualitas Pembangunan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)"**

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

TABEL II.1.A
Matriks Penjenjangan Strategis 2021 – 2025

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,84
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,60 (A)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%
	Index Profesionalitas ASN	85,50 (Tinggi)
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,60 (A)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	90 %
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89 %
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	164 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	90 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	90 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	183 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	73,68 %
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	57 OPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	25 Organisasi

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	25 Lembaga
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga
Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100 %
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	10 Lembaga
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A/UPTD PPA	12 Mitra/Jejaring
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	2 Orang
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	100 %
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 Buku
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak	100 %
	Prosentase desa kelurahan layak anak	100 %
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	3 Jejaring
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	100 %
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialilasi Pencegahan Perkawinan Anak	25 Orang
Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	15 Orang
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	10 Orang
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	5 Orang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Penanganan Sosial	3 Orang
Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	Prevalensi KB Aktif	80,50%
Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Orang
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Program Bangga Kencana	1 Dokumen
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen
Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	18 Unit
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,50 %
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program Bangga Kencana	2 Media
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Laporan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok	10 Laporan
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen
Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan honorarium	60 Orang
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.828 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes KB yang mendapatkan distribusi alokon	50 Faskes
Sub Kaegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.555 Orang
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1.829 PPKBD dan Sub PPKBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	96 Kampung KB
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,50%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97.91 %
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)/Laporan	1 Dokumen
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	21 Unit
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25 Orang
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting yang Terdampingi	18.825 Orang
Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	25 Laporan
Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan

2. B. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojopahit Tahun 2025 – 2029 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. VISI

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 tahun kedepan periode Tahun 2025 - 2029 yakni : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR"**

b. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi Kabupaten Mojokerto tahun berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ;
2. Mewujudkan SDM yang Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif dan Berkarakter, Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Menjaga Ketentraman Masyarakat ;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Kepada Semua Tingkatan, Koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan di Semua Sektor untuk Mendorong Kebutuhan Ekonomi, Pelayanan Publik dan Mendukung Akses Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan;

Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera adalah selaras dengan visi Bupati terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur dengan misi yaitu : ***Misi 2 Mewujudkan SDM yang Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif dan Berkarakter, Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Menjaga Ketentraman Masyarakat.***

c. TUJUAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan "*Misi 2* maka ditetapkan tujuan **TERWUJUDNYA KELUARGA DAN PEMBANGUNAN GENDER YANG BERKUALITAS**

d. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana
2. Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan
4. Meningkatnya Perlindungan Anak
5. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

TABEL II.2.B
Matriks Penjenjangan Strategis 2025 - 2029

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Terwujudnya Keluarga, dan Pembangunan Gender yang berkwalitas	I Bangga	65,11
	I PG	91,84
Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,50
	Indeks Profesionalitas ASN	85,50
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	90 %
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	89 %
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang/bulan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	90 %
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	9 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	164 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 Dokumen
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Materia	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130 Laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	90 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	90 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	183 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	18 Unit
Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07
Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Orang
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Program Bangga Kencana	1 Dokumen
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen
Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	18 Unit
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,07 %
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program Bangga Kencana	2 Media
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Laporan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen
Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan honorarium	1828 Orang
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1828 Orang
Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1Laporan
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes KB yang mendapatkan distribusi alokon	50 Faskes
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3638 Orang
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Kegitan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1828 PPKBD/Sub
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	96 Kampung
Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15 %
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	96.96 %
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	46 Kelompok
Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	21 Unit
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25 Orang
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting yang Terdampingi	11000 Orang
Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	862 laporan
Sub Kegitan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan
Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	73.68 %
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender	57 PD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwirausaha	40 Orang
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	25 Lembaga
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100 %
Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100 %
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	10 Lembaga
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A/UPTD	12 Mitra/Jejaring
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 Orang
Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100 %
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	100 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 Buku
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak	100 %
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	3 Lembaga
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	100 %
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialilasi Pencegahan Perkawinan Anak	25 Orang
Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	15 Orang
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	10 Anak
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	5 Orang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Penanganan Sosial	3 Orang
Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan

e. KEBIJAKAN

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2025 dirumuskan kebijakan :

a. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja, karang taruna maupun keluarganya.
b. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap pelajar, mahasiswa dan santri melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren.
c. Meningkatkan penyuluhan " Life Skill " bagi remaja dengan memberikan ketrampilan.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB di KKB dan Rumah Sakit.
e. Meningkatkan pengetahuan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).
f. Melakukan evaluasi dan monitoring.
g. Menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
h. Melakukan pelatihan CTU (Contraseption Tehnology Update) bagi dokter dan bidan.
i. Memanfaatkan momentum hari jadi Pemkab Mojokerto, IBI, TNI, PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong.
j. Mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Propinsi Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja, karang taruna maupun keluarganya.
k. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen politis yang mendukung pencapaian target ketahanan keluarga di berbagai tingkatan
l. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program ketahanan keluarga.
m. Melakukan pelatihan dan pendampingan kader bina keluarga (BKB, BKR, BKL).
n. Menyediakan sarana dan materi pembinaan.
o. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai kesamaan tujuan (Dinas Pendidikan , Dinas Kesehatan, PKK).
p. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui peningkatan kwalitas dan kwantitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
q. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga ekonomi sebagai penyandang dana bantuan UPPKS.
r. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap kelompok UPPKS.

s. Melakukan pembinaan manajemen bagi ibu yang mempunyai usaha.
t. Meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
u. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
v. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
w. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ditingkat desa.
x. Tempat Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (UPTD PPA).
y. Pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk
z. Memperkuat kelembagaan pangarusutamaan jender dan anak serta memperkuat program pemberdayaan perempuan.

II.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, melalui IKU (Indikator Kinerja Utama) yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING) melalui lomba duta genre dan Pembinaan PIK Remaja dan Duta Genre Desa untuk pencegahan stunting. dan fasilitasi usaha perempuan perempuan yang mendapatkan fasilitasi mampu untuk mandiri dan mengembangkan potensi diri sesuai yang di milikinya.

IKU (Indikator Kinerja Utama) DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto untuk Periode 2021 – 2026 ada 8 Indikator yaitu :

1. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Prevalensi KB Aktif
4. Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
6. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
7. Index Profesionalitas ASN
8. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Sedangkan IKU (Indikator Kinerja Utama) DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto untuk Periode 2021 – 2026 ada 6 Indikator yaitu :

1. Persentase Kepesertaan KB.
2. Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di damping.
3. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan.
4. Presentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan.
5. Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG.
6. Nilai SAKIP PD.

Table 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Peremuan Perlindungan Anak serta Kelauraga Berencana	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Nilai	Di dapat dari 3 komponen kunci : 1. Pelembagaan PUG 2. Penyelenggaraan PUG **3.** Inovasi PUG	Kementrian PPPA
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai	Berdasarkan 5 Klaster : 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya 5. Perlindungan Khusus	Kementrian PPPA
		Pravelensi KB Aktif	Persen	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Aktif\ (PA)}{Jumlah\ \ Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)} x\ 100\%$	Bidang KB/Bidang Dalduk
		Presentase Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteran keluarga	Persen	$\frac{Jumlah\ Keluarga\ yang\ ikut\ kelompok\ ketahanan\ dan\ kesejahteraan\ keluarag}{Jumlah\ \ sasaran\ kelompok\ ketahanan\ dan\ kesejahteraan\ keluarga} x\ 100\%$	Bidang PPKS/Bidang Dalduk
2.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE AKIP dari Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	$\frac{Jumlah\ Realisasi\ Anggaran\ Perangkat\ Daerah}{Jumlah\ Anggaran\ Perangkat\ Daerah} x\ 100\%$	Bagian Kauangan
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya	BKPSDM
3.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			

Table 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	Persen	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Aktif\ (PA)}{Jumlah\ \ Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)} x\ 100\%$	Bidang KB/Bidang Dalduk
2.	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di damping	Persen	$\frac{Jumlah\ Keluarga\ Resiko\ Stunting\ yang\ di\ Dampingi}{Jumlah\ \ Keluarga\ Resiko\ Stunting} x\ 100\%$	Bidang PPKS/Bidang Dalduk
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	Persen	$\frac{Jumlah\ Korban\ Yang\ Terselesaikan}{Jumlah\ \ Korban} x\ 100\%$	Bidang PPPUG/UPTD PPA
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	Persen	$\frac{Jumlah\ Korban\ Yang\ Terselesaikan}{Jumlah\ \ Korban} x\ 100\%$	Bidang PA/UPTD PPA
5.	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Persen	$\frac{Jumlah\ ARG\ Pada\ Belanja\ Operasional\ dan\ Modal\ APBD}{Jumlah\ \ Seluruh\ Belanja\ Operasional\ dan\ Modal\ APBD} x\ 100\%$	Bidang PPPUG
6.	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE AKIP dari Inspektorat

II.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 (APBD)

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya
		1.3	Prevalensi KB Aktif	80,50 %
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,50 %
NO	**KINERJA LAINNYA**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,60 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,50 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.553.435.525,00	APBD 2025
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 187.393.000,00	APBD 2025
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 98.000.000,00	APBD 2025
4.	Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak	Rp. 26.000.000,00	APBD 2025
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 18.000.000,00	APBD 2025
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 75.000.000,00	APBD 2025
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.580.400.000,00	APBD 2025
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.198.500.000,00	APBD 2025
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 5.879.200.000,00	APBD 2025

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 (PAPBD)

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07
2.	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100%
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100%
5.	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78

6.	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.289.213.925,00	PAPBD 2025
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 174.709.100,00	PAPBD 2025
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 90.546.700,00	PAPBD 2025
4.	Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak	Rp. 25.367.350,00	PAPBD 2025
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 51.410.050,00	PAPBD 2025
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 65.243.750,00	PAPBD 2025
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.572.368.800,00	PAPBD 2025
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.664.425.000,00	PAPBD 2025
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 6.015.915.000,00	PAPBD 2025

Adapun Lampiran Perjanjian Kinereja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto APBD Tahun 2025 dan PAPBD Tahun 2025 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran LKjIP DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100%
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Nindya	100%
		1.3	Prevalensi KB Aktif	80,50%	80,50%	100%
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,50%	89,86%	122%

2. Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,60 (A)	85,62 (A)	101%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,50 %	95,88 %	99,36%
		1.3	Index Profesionalitas ASN	85,50 (Tinggi)	87,40 (Tinggi)	102 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**
Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07	80,50	100,5%
Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15	89,45 %	101 %
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100%	100 %	100 %
Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100%	100 %	100 %
Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78 %	12,73 %	108 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60	85,62	101 %

TABEL III.1
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07%	-	-	-	80,50%	80,50%	100,5%
2.	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15	-	-	-	89,45%	89,45%	101 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100%	-	-	-	100%	100%	100 %
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100%	-	-	-	100%	100%	100 %
5.	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78	-	-	-	12,73%	12,73%	108 %
6.	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60	-	-	85,62	-	85,62	101 %

Dari 6 indikator di atas tidak dapat di lakukan pengukuran berdasarkan tiap triwulan di karenakan pengukuran di lakukan secara kumulatif.

III.2 Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak

meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja yang dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilihat dari bagaimana Organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Rumus 1:

   Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \quad 100\%$$

2) Rumus 2:

   Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

Tabel : 3.2.a
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2025 Periode Perencanaan 2021 - 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,18	91,84	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG
						Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Nindya	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PA
						Prevalensi KB Aktif	80,50 %	80,50 %	100 %	Sangat Tinggi	Bidang KB
						Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,50 %	89,86 %	122,26 %	Sangat Tinggi	Bidang PPKS
2.					Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,60 (A)	85,62 (A)	101,20 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
						Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,50 %	95,88 %	99,36 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
						Indeks Profesionalitas ASN	85,50 (Tinggi)	87,40 (Tinggi)	102 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
3.					Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 : "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana" dengan indikator :

1. **Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)**, tahun 2025 terealisasi dengan Nilai APE Ninya dari target APE Nindya dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

   Perhitungan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE) dengan nilai APE Nindya diperoleh dari 3 komponen kunci :

   a) **Pelembagaan PUG** terdiri dari :
      a. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG, di buktikan dengan SK Fokal Point, **Perda Nomor 1 Tahun 2021** tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), **Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
      b. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
      c. Kelembagaan, telah terbentuk **UPTD PPA** dengan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2023
      d. Kelompok Pokja PUG, **Tim driver PUG**, **Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG**
      e. **Sumber Daya Manusia** yang **terlatih PUG** (SDM Perencana, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan, SDM APIP, SDM Bidang Hukum, SDM Aparat Penegak Hukum dan **Internalisasi PUG** serta Fasilitas yang memadai
      f. Sistem Data Terpilah Gender data diperoleh dari tiap Perangkat Daerah berupa **Satu Data Palapa** (Data Statistik yang terpilah dan Profil Gender)

   b) Penyelenggaraan PUG terdiri dari **:**
      a. Perencanaan dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1
      b. Penganggaran PUG dibuktikan dengan issue Gender dalam penganggaran PUG dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim), Ekonomi dan Bidang Lainnya mulai pada RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
      c. Pelaksanaan dibuktikan dengan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Akademisi Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mintra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan

Pengarus utamaan Gender serta ketersediaan sarana dan prasarana yang responsive Gender dan juga pelaksanaan (advokasi dan sosialisasi, bimtek, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan Evaluasi) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

d. Pemantauan, melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang Responsif Gender
e. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah dalam bentuk Evaluasi Dokumen ARG Perangkat Daerah, Desk PPRG.
f. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kab. Mojokerto berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLLHP) terhadap Dokumen Anggaran Responsif Gender.
g. Pelaporan berupa Lakip, LKPJ, LPPD dan Laporan Pelaksanaan PUG yang disampaikan kepada Gubernur jawa Timur melalui DP3AK Prov. Jatim.

c) Inovasi PUG meliputi:

Berupa duplikasi/replikasi kearifan Lokal atau Modifikasi merupakan bentuk kebaruan (ide/gagasan baru) terintegrasi dengan layanan sistem lain, berkelanjutan, yang dicapai dengan cara kreatif, memiliki dampak dan direplikasi sebagai best practice. (Inovasi Kasat Mata, Inovasi labujari, Inovasi Darisasoo, Inovasi Mensasoo.

TABEL 3.2.a.1

APE MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2025:

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 – 700	Monev
2021	MADYA	601 – 700	Tidak ada monev
2022	MADYA	601 – 700	Tidak ada monev
2023	NINDYA	701 – 800	Monev
2024	NINDYA	701 – 800	Tidak ada monev
2025	NINDYA	701 – 800	Nilai tahun 2023 karena tahun 2025 masih proses monev yang di lakukan di tahun 2026

Sumber data : Bidang PPPUG rilis tahun 2023

GAMBAR 3.2.a.1

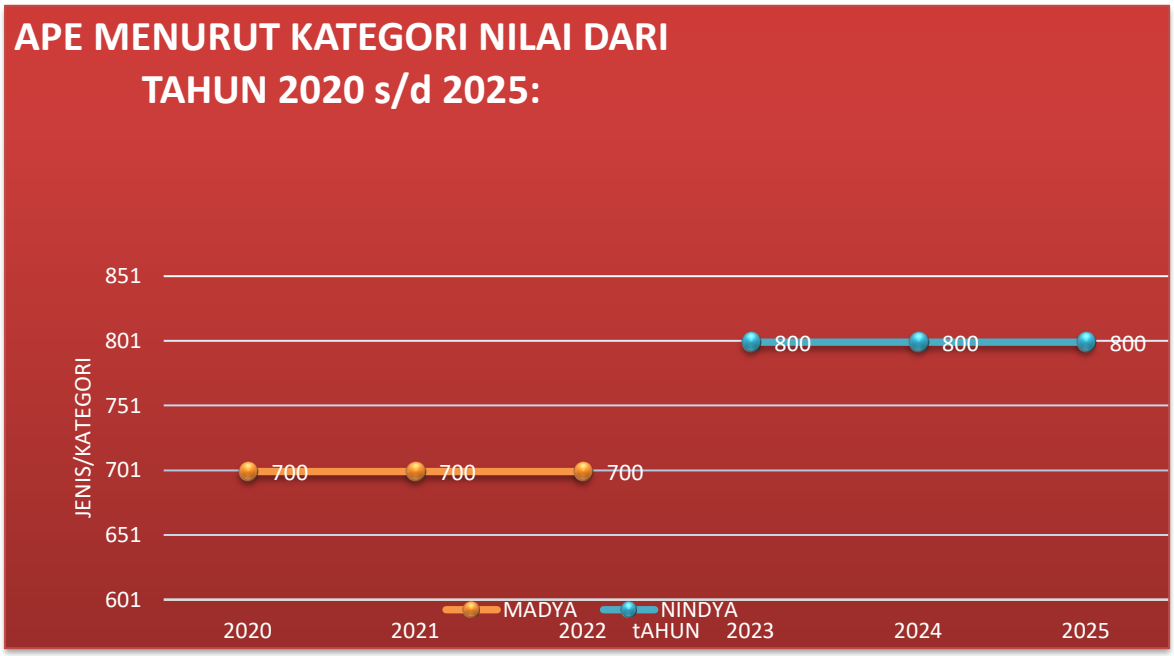

Adapun monitoring dan evaluasi implementasi PUG yang di lakukan melalui pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terdiri atas prasarat aspek organisasi :

1. Komitmen politik dan kepemimpinan kelembagaan;
2. Kebijakan responsif gender;
3. Kelembagaan;
4. Sumber daya manusia dan anggaran;

Sementara itu, prasarat aspek non organisasi meliputi :

1. Sistem informasi dan data terpilah/gender;
2. Alat analisis gender;
3. Partisipasi masyarakat.

Walaupun sudah memenuhi target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Terdapat perangkat daerah yang belum mengumpulkan dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender);
- Terdapat perangkat daerah yang belum paham membuat dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender); dan
- Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rencana tindaklanjut :

- Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah pada Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);
- Mengintensifkan koordinasi dengan perangk daerah terkait pengumpulan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);

2. **Kabupaten Layak Anak (KLA)**, tahun 2025 terealisasi dengan Nilai KLA Nindya dari target KLA Nindya dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Perhitungan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan nilai KLA Nindya diperoleh berdasarkan 5 klaster :
    1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan, kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).
    2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Lkesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2.
    3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredianya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)
    4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
    5. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial, Perlindungan dan

mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

TABEL 3.2.a.2

KLA MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2025 :

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 - 700	Tidak ada Monev
2021	MADYA	601 – 700	Monev
2022	MADYA	601 – 700	Monev
2023	MADYA	601 – 700	Monev
2024	NINDYA	701 – 800	Monev Tahun 2025
2025	NINDYA	701 – 800	Monev

Sumber data : Bidang Perlindungan Anak rilis tahun 2025

GAMBAR 3.2.a.2

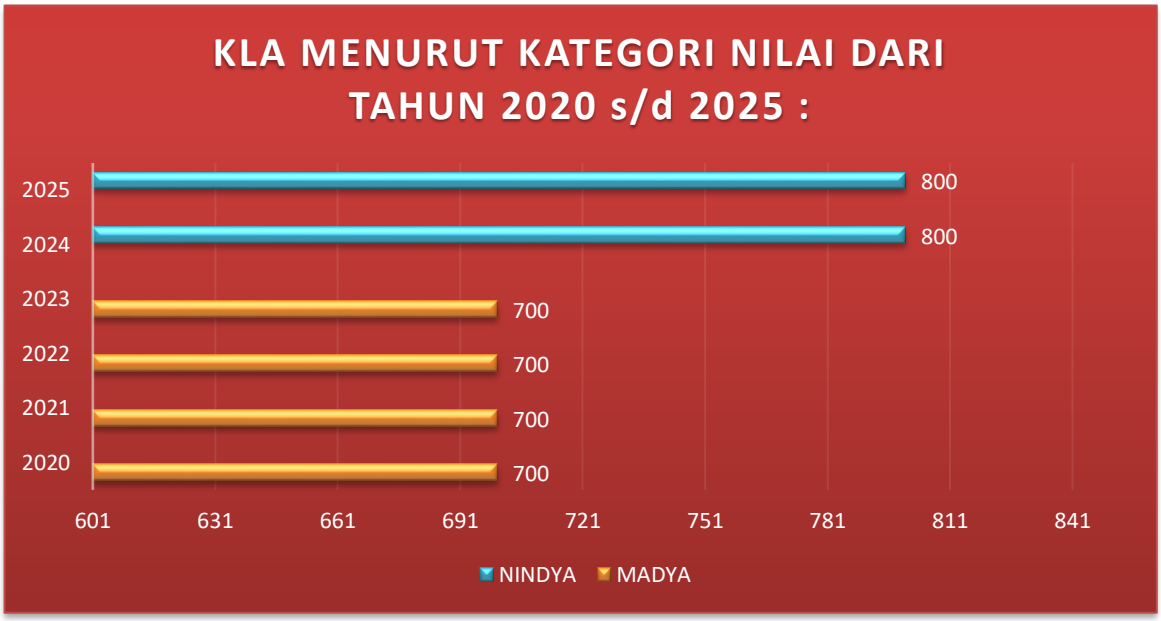

Adapun penilaian yang di lakukan dalam rangka mewujudka Kabupaten Layak Anak adalah pemenuhan 31 hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh Perangkat daerah Terkait, misal :

1. Dispenduk capil berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan diantaranya identitas anak;

2. Dinas Sosial dan DP2KBP2 berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (anak – anak terlantar);
3. Dinas Kesehatan berkaitan dengan Kesehatan dasar dan Kesejahteraan terkait pencehan stunting, 1000 hari Pertama Kehidupan, tumbuh kembang anak dll;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya berkaitan dengan Dinas Pendidikan;
5. Dinas Sosial dan BPBD berkaitan dengan Perlindungan khusus diantaranya anak disabilitas, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak korban bencana alam.

   Walaupun sudah kategori tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

   - Tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Tahun 2025 ;
   - Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di laksanakan Tahun 2025; dan
   - Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
   - Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

   Rencana tindaklanjut :

   - Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait data yang di perlukan;
   - Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengumpulan data yang di perlukan.

3. **Prevalensi KB Aktif**, tahun 2025 terealisasi sebesar 80,50 % dari target 80,50 % dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi.**

   Perhitungan Prevalensi KB Aktif sebesar 80,50 % diperoleh dari :

$$\frac{Jumlah\ Peserta\ Aktif\ (PA)}{Jumlah\ \ Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)}\ x\ 100\%$$

TABEL 3.2.a.3
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2025

NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JML	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2025		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.591	8.056	698	550	1	464	588	3.008	1.144	6.453	140,56	1.837	28,47	80,10
2	GONDANG	5.912	9.556	1.691	730	30	12	2.070	2.697	846	8.076	136,60	4.521	55,98	84,51
3	PACET	8.527	13.458	2.080	630	11	11	2.327	4.530	1.266	10.855	127,30	5.048	46,50	80,66
4	TRAWAS	3.878	6.362	455	412	3	38	734	2.815	643	5.100	131,51	1.604	31,45	80,16
5	NGORO	10.896	17.530	1.656	1.164	11	364	1.382	6.581	2.867	14.025	128,72	4.213	30,04	80,01
6	PUNGGING	8.643	14.323	1.258	434	9	133	589	7.853	1.127	11.403	131,93	2.290	20,08	79,61
7	KUTOREJO	7.260	11.792	548	389	3	240	1.245	4.524	2.697	9.646	132,87	2.185	22,65	81,80
8	MOJOSARI	7.973	13.245	2.906	1.166	15	492	1.318	3.361	1.408	10.666	133,78	5.405	50,68	80,53
9	DLANGGU	7.956	10.143	968	790	27	45	851	4.560	942	8.183	102,85	2.636	32,21	80,68
10	BANGSAL	5.999	9.583	657	413	5	327	682	4.719	967	7.770	129,52	1.757	22,61	81,08
11	PURI	8.720	13.948	1.385	765	17	844	2.074	3.940	2.292	11.317	129,78	4.241	37,47	81,14
12	TROWULAN	7.076	12.731	699	645	11	117	956	5.610	1.645	9.683	136,84	2.311	23,87	76,06
13	SOOKO	9.414	15.328	2.023	865	4	406	971	6.635	1.365	12.269	130,33	3.863	31,49	80,04
14	GEDEG	5.332	9.151	791	592	2	406	511	3.892	1.135	7.329	137,45	1.896	25,87	80,09
15	KEMLAGI	7.048	11.232	919	819	37	245	1.323	4.975	897	9.215	130,75	3.098	33,62	82,04
16	JETIS	12.079	19.596	1.197	701	62	630	1.337	9.258	2.268	15.453	127,93	3.297	21,34	78,86
17	DAWARBLANDONG	5.890	8.855	361	343	6	89	874	4.744	1.081	7.498	127,30	1.584	21,13	84,68
18	MOJOANYAR	5.622	9.101	973	518	10	213	914	3.508	1.193	7.329	130,36	2.415	32,95	80,53
	KABUPATEN	132.816	213.990	21.265	11.926	264	5.076	20.746	87.210	25.783	172.270	129,71	54.201	31,46	80,50

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk rilis tahun 2025

TABEL 3.2.a.4
Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2025
1	IUD	21.265
2	MOW	11.926
3	MOP	264
4	Kondom	5.076
5	Implant	20.746
6	Suntik	87.210
7	Pil	25.783
	TOTAL	172.270

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk rilis tahun 2026 bulan januari

GAMBAR 3.2.a.4

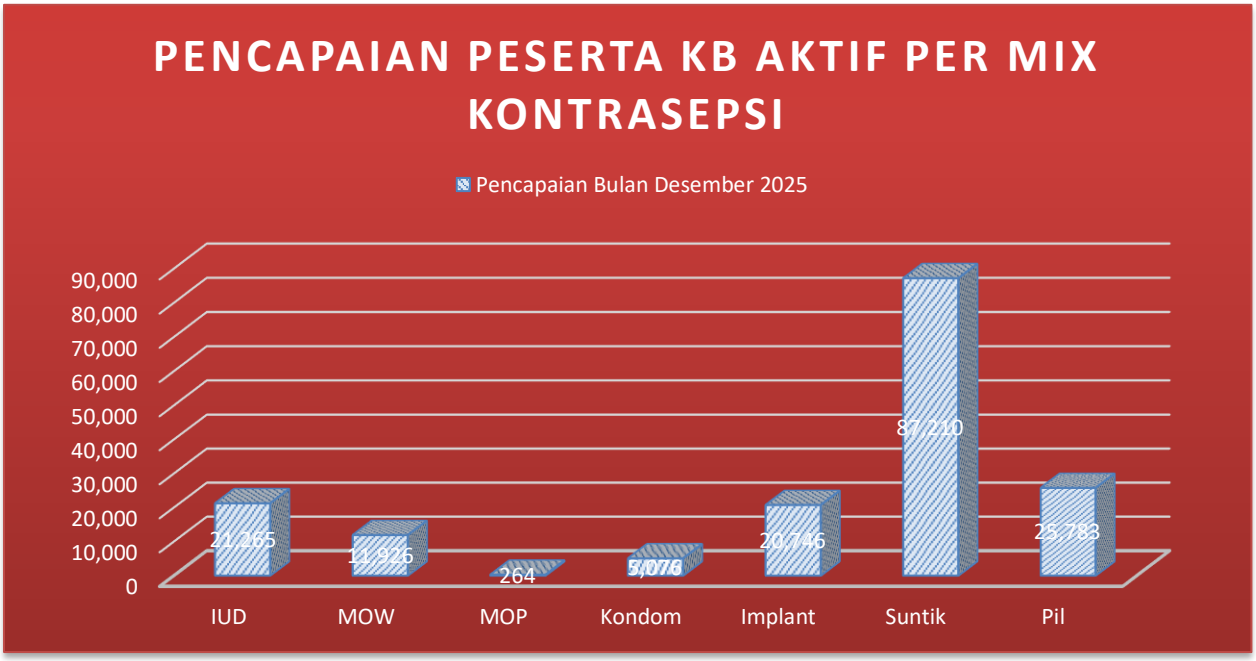

TABEL 3.2.a.5

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 s/d 2025

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2020	245.061	197.565	80,62
2.	2021	247.373	199.545	80,67
3.	2022	227.174	183.388	80,73
4.	2023	230.204	184.695	80,23
5.	2024	225.684	180.682	80,06
6.	2025	213.990	172.270	80,50

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk, rilis tahun 2026 bulan Januari

GAMBAR 3.2.a.5

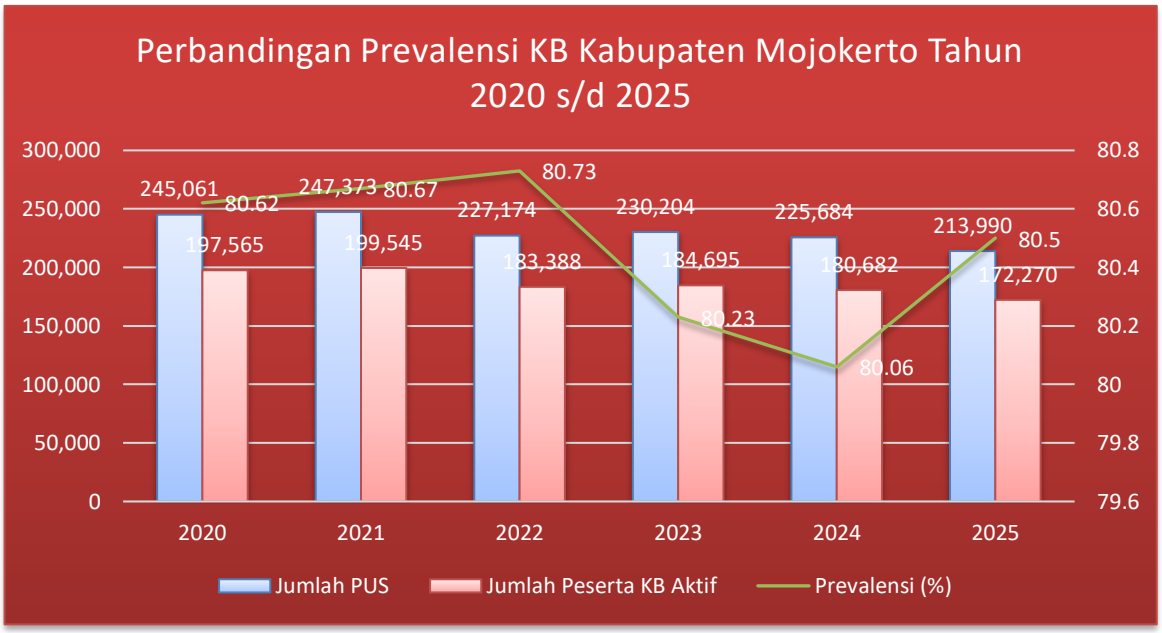

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Menurunnya unmet need (pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi) Tahun 2025 ;
- Kurang nya Kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- Kurangkanya kepesertaan KB Aktif;
- Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- Belum optimalnya evaluasi kinerja kepada penyuluh KB serta kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Rencana tindaklanjut :

- Dilakukan Sosialisasi KB dengan sasaran Pasangan Usia Subur;
- Dilakukan pelayanan KB Kepada PUS anmet need dan sosialisasi KB MKJP;

- Dilakukan pelatihan SDM bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD;
- Dilakukan pelatihan SDM bagi petugas medis; dan
- Pendistribusian alokon ke faskes – faskes tepat waktu.

4. **Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**, terealisasi sebesar 89,86 % dari target 73,50 % dan tingkat capaian sebesar 122,26 % dengan predikat **Sangat Tinggi.**

   Perhitungan Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 89,86 % di peroleh dari :

$$\frac{Jumlah\ Keluarga\ yang\ ikut\ kelompok\ ketahanan\ dan\ kesejahteraan\ keluarga}{Jumlah\ \ sasaran\ kelompok\ ketahanan\ dan\ kesejahteraan\ keluarga}\ x\ 100\%$$

TABEL 3.2.a.6
PRESENTASE KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG AKTIF

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN					REKAP JUMLAH SASARAN	JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN SD BULAN DESEMBER					REKAP JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN	%
		BKB	BKL	BKR	PIK - R	UPPKA		BKB	BKL	BKR	PIK - R	UPPKA		
1.	JATIREJO	2.556	343	570	160	20	3.649	2.655	318	535	157	20	3.685	100,99
2.	GONDANG	2.577	412	381	275	20	3.665	1.945	348	376	220	20	2.909	79,37
3.	PACET	3.506	1.478	533	150	35	5.702	3.615	1.465	528	147	35	5.790	101,54
4.	TRAWAS	1.430	693	166	150	37	2.476	1.650	668	165	123	34	2.640	106,62
5.	NGORO	4.618	4.621	1.484	130	36	10.889	4.172	4.296	1.454	115	36	10.073	92,51
6.	PUNGGING	4.127	1.852	1.076	130	55	7.240	4.402	1.718	991	125	53	7.289	100,68
7.	KUTOREJO	4.190	2.441	824	130	55	7.640	3.310	2.365	788	95	54	6.612	86,54
8.	MOJOSARI	3.341	1.587	1.181	152	25	6.286	2.529	1.495	1.112	95	23	5.254	83,58
9.	DLANGGU	3.175	1.529	662	684	100	6.150	2.446	1.106	583	670	70	4.875	79,27
10.	BANGSAL	2.757	391	625	150	31	3.954	2.530	361	522	105	31	3.549	89,76
11.	PURI	4.107	980	563	150	41	5.841	2.967	865	509	140	41	4.522	77,42
12.	TROWULAN	4.232	652	571	325	7	5.787	4.241	422	420	300	7	5.390	93,14
13.	SOOKO	3.906	415	761	150	22	5.254	4.317	384	688	130	20	5.539	105,42
14.	GEDEG	2.726	6.904	3.310	252	72	13.264	2.544	4.283	2.481	245	69	9.622	72,54
15.	KEMLAGI	3.050	391	893	150	66	4.550	3.042	390	873	100	66	4.471	98,26
16.	JETIS	4.420	755	489	100	203	5.967	4.053	684	481	80	198	5.496	92,11
17.	DAWARBLANDONG	2.648	661	807	700	376	5.192	2.724	603	720	695	351	5.093	98,09
18.	MOJOANYAR	2.827	396	447	175	55	3.900	2.850	302	377	130	45	3.704	94,97
JUMLAH		60.193	26.501	15.343	4.113	1.256	**107.406**	55.992	22.073	13.603	3.672	1.173	**96.513**	**89,86**

Sumber Data : Bidang PPKS rilis tahun 2026 bulan januari

Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten mojokerto Sebesar 96.513 Keluarga dapat di lihat dari data sebagai berikut :

TABEL 3.2.a.7
JUMLAH KELUARGA YANG IKUT KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN MOJOKERTO

No.	Kelompok	Juamlah Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sasaran
1.	BKB	55.992	60.193
2.	BKR	13.603	15.343
3.	BKL	22.073	26.501
4.	PIK - R	3.672	4.113
5.	UPPKA	1.173	1.256
JUMLAH		**96.513**	**107.406**

Sumber Data : Bidang PPKS rilis tahun 2026 bulan januari

GAMBAR 3.2.a.7

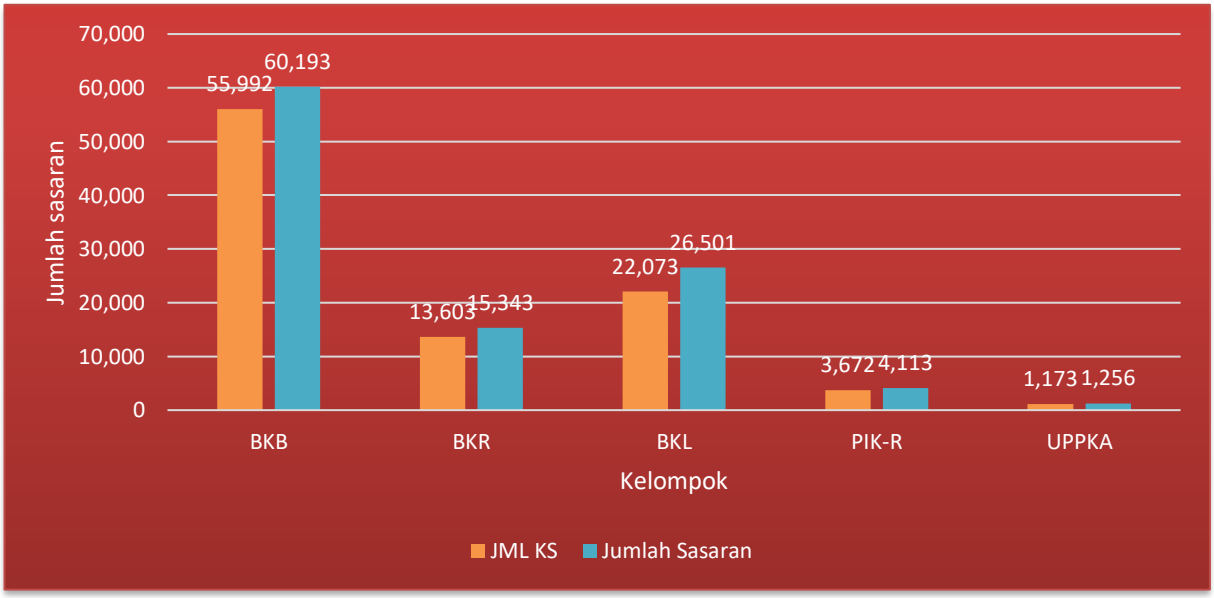

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya kepesertaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA) Tahun 2025; dan
- Pengumpulan data tidak tepat waktu.

Rencana tindaklanjut :

- Dilakukan Sosialisasi pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA);
- Dilakukan pelatihan SDM bagi kader BKB, BKR, BKL, UPPKA;

b. Sasaran strategis 2 : "Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel" dengan indikator :

1. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, dengan Nilai 85,62 (A) dari target 84,60 (A) dan tingkat capaian sebesar 101,20% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

   Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh Inpektorat

TABEL 3.2.a.8
NILAI SAKIP DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2025

TAHUN	NILAI	KETERANGAN
2021	83,19 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 27,74 2. Pengukuran kinerja 20,00 3. Pelaporan Kinerja 12,58 4. Evaluasi Internal 16,81 5. Pencapaian Sasaran/kinerja 16,81
2022	83,87 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 28,98 2. Pengukuran kinerja 25,99 3. Pelaporan Kinerja 12,05, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 16,85
2023	84,42 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,88 2. Pengukuran kinerja 25,35 3. Pelaporan Kinerja 12,44, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,71
2024	84,55 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,50, 2. Pengukuran kinerja 26,10 3. Pelaporan Kinerja 12,45, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,50
225	85,62 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,35, 2. Pengukuran kinerja 26,73 3. Pelaporan Kinerja 13,29, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,50

Sumber data : Perencana/Inspektorat rilis tahun 2025

GAMBAR 3.2.a.8

2. **Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**, sebesar 95,88 % dari target 96,50 % dan tingkat capaian sebesar 99,36 % dengan predikat **Sangat Tinggi.**

   Perhitungan Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 95,88 % di lihat dari :

$$\frac{Jumlah\ Realisasi\ Anggaran\ Perangkat\ Daerah}{Jumlah\ Anggaran\ Perangkat\ Daerah}\ x\ 100\%$$

TABEL 3.2.a.9

NILAI PROSENTASE RLA DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2025

TAHUN	Prosentase (%)	KETERANGAN
2021	78,59	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.704.695.874,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : Rp. 18.136.274.266,00 Realisasi : Rp. 14.252.444.199,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.883.830.029,00
2022	84,67	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.760.987.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : Rp. 20.080.700.356,00 Realisasi : Rp. 17.001.692.415,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.079.007.941,00
2023	95,83	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.282.709.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : Rp. 20.975.893.333,00 Realisasi : Rp. 19.949.298.363,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 1.026.594.970,00
2024	96,22	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.140.239.912,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : Rp. 20.431.065.412,00 Realisasi : Rp. 19.657.817.756,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 773.247.656,00
2025	95,88	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 19.512.226.675,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : Rp. 19.949.199.675,00 Realisasi : Rp. 19.127.534.787,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 821.664.888,00

Sumber data : Bagian Keuangan rilis tahun 2025

GAMBAR 3.2.a.9

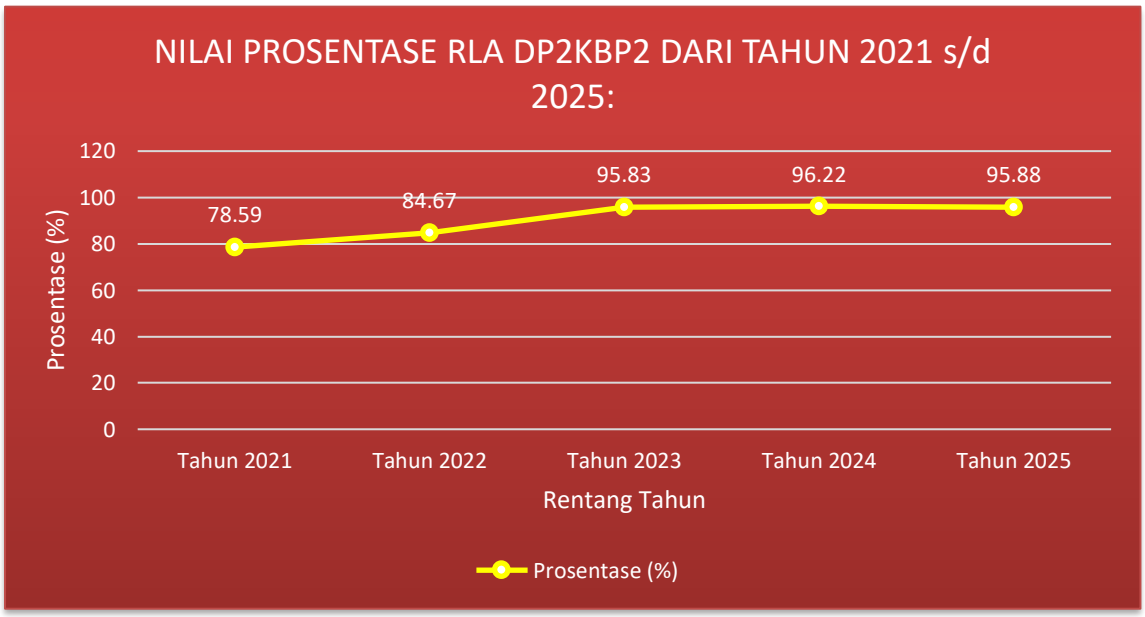

TABEL 3.2.a.10
PROYEKSI REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)			SISA	KEU	FISIK	KET.
			SETELAH PAPBD (Rp)	S/D BLN LALU (Rp)	BLN INI (Rp)	S/D BLN INI (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	16.575.000,00	14.575.000,00	1.300.000,00	15.875.000,00	700.000,00	95,78%	90,00%	APBD
2	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	108.334.100,00	87.311.186,00	16.186.000,00	103.497.186,00	4.836.914,00	95,54%	85,00%	APBD
3	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.800.000,00	42.913.488,00	4.061.344,00	46.974.832,00	2.825.168,00	94,33%	90,00%	APBD
4	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.546.700,00	39.251.909,00	2.725.000,00	41.976.909,00	569.791,00	98,66%	95,00%	APBD
5	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	75,00%	75,00%	APBD
6	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.367.350,00	24.457.289,00	0,00	24.457.289,00	910.061,00	96,41%	100,00%	APBD
7	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.703.050,00	41.020.970,00	2.420.000,00	43.440.970,00	1.262.080,00	97,18%	98,00%	APBD
8	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia	6.707.000,00	6.689.180,00	0,00	6.689.180,00	17.820,00	99,73%	100,00%	APBD
9	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	7.380.550,00	6.935.000,00	0,00	6.935.000,00	445.550,00	93,96%	100,00%	APBD
10	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%	APBD
11	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	4.863.200,00	4.652.400,00	0,00	4.652.400,00	210.800,00	95,67%	100,00%	APBD
12	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	48.000.000,00	32.000.000,00	3.000.000,00	35.000.000,00	13.000.000,00	72,92%	70,00%	APBD
13	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	3.750.000,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	175.000,00	95,33%	100,00%	APBD
14	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.350.000,00	1.800.000,00	412.088,00	2.212.088,00	137.912,00	94,13%	100,00%	APBD

15	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.766.052.000,00	3.960.592.507,00	441.993.973,00	4.402.586.480,00	363.465.520,00	92,37%	90,00%	APBD
16	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.902.100,00	142.235.799,00	535.997,00	142.771.796,00	3.130.304,00	97,85%	100,00%	APBD
17	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	10.388.000,00	1.372.000,00	11.760.000,00	240.000,00	98,00%	95,00%	APBD
18	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.761.100,00	13.938.044,00	818.960,00	14.757.004,00	4.096,00	99,97%	96,00%	APBD
19	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.180.800,00	6.390.000,00	600.000,00	6.990.000,00	190.800,00	97,34%	85,00%	APBD
20	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.721.825,00	27.321.764,00	6.031.090,00	33.352.854,00	368.971,00	98,91%	95,00%	APBD
21	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00	3.956.500,00	0,00	3.956.500,00	43.500,00	98,91%	100,00%	APBD
22	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.800.400,00	37.461.546,00	3.570.000,00	41.031.546,00	768.854,00	98,16%	95,00%	APBD
23	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.894.991,00	51.037.351,00	6.174.263,00	57.211.614,00	4.683.377,00	92,43%	90,00%	APBD
24	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.852.000,00	47.389.760,00	4.308.160,00	51.697.920,00	2.154.080,00	96,00%	93,00%	APBD
25	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.348.709,00	102.478.993,00	9.787.999,00	112.266.992,00	4.081.717,00	96,49%	93,00%	APBD
26	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.990.000,00	10.358.789,00	1.190.009,00	11.548.798,00	441.202,00	96,32%	90,00%	APBD
27	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.610.000,00	11.285.000,00	2.135.000,00	13.420.000,00	190.000,00	98,60%	86,00%	APBD
28	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	66.899.700,00	66.560.384,00	83.500,00	66.643.884,00	255.816,00	99,62%	100,00%	DAK
29	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	8.682.500,00	8.510.000,00	0,00	8.510.000,00	172.500,00	98,01%	100,00%	DAK
30	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	47.260.586,00	4.220.975,00	51.481.561,00	8.518.439,00	85,80%	90,00%	DAK
31	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	242.400.000,00	227.400.000,00	15.000.000,00	242.400.000,00	0,00	100,00%	100,00%	DAK
32	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.188.000.000,00	990.000.000,00	198.000.000,00	1.188.000.000,00	0,00	100,00%	90,00%	DAK
33	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	6.386.600,00	5.776.000,00	0,00	5.776.000,00	610.600,00	90,44%	95,00%	DAK
34	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	5.225.000,00	3.725.000,00	585.654,00	4.310.654,00	914.346,00	82,50%	75,00%	DAK
35	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	882.000.000,00	748.434.500,00	128.793.900,00	877.228.400,00	4.771.600,00	99,46%	90,00%	DAK

36	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	360.000.000,00	287.755.200,00	71.938.800,00	359.694.000,00	306.000,00	99,92%	100,00%	DAK
37	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	116.165.545,00	2.564.100,00	118.729.645,00	6.270.355,00	94,98%	96,00%	DAK
38	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	162.078.400,00	66.896.000,00	228.974.400,00	21.025.600,00	91,59%	78,00%	DAK
39	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.070.650.000,00	1.039.209.600,00	0,00	1.039.209.600,00	31.440.400,00	97,06%	100,00%	DAK
40	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.247.900.000,00	1.042.469.007,00	202.987.928,00	1.245.456.935,00	2.443.065,00	99,80%	90,00%	DAK
41	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	162.000.000,00	135.000.000,00	12.000.000,00	147.000.000,00	15.000.000,00	90,74%	90,00%	DAK
42	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	30.000.000,00	20.610.000,00	2.575.000,00	23.185.000,00	6.815.000,00	77,28%	80,00%	DAK
43	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.943.050.000,00	1.567.588.000,00	131.175.000,00	1.698.763.000,00	244.287.000,00	87,43%	88,00%	DAK
44	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.000.000,00	50.710.000,00	0,00	50.710.000,00	290.000,00	99,43%	100,00%	DAK
45	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	537.600.000,00	535.350.000,00	0,00	535.350.000,00	2.250.000,00	99,58%	100,00%	DAK
46	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10.000.000,00	9.732.500,00	0,00	9.732.500,00	267.500,00	97,33%	100,00%	DAK
47	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	278.415.000,00	0,00	220.396.050,00	220.396.050,00	58.018.950,00	79,16%	10,00%	DAK
48	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	38.300.000,00	37.365.800,00	0,00	37.365.800,00	934.200,00	97,56%	100,00%	DAK
49	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.586.000.000,00	2.068.700.000,00	517.200.000,00	2.585.900.000,00	100.000,00	100,00%	95,00%	DAK

50	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3.103.200.000,00	2.482.440.000,00	620.640.000,00	3.103.080.000,00	120.000,00	100,00%	95,00%	DAK
		JUMLAH	**19.949.199.675,00**	**16.420.855.997,00**	**2.706.678.790,00**	**19.127.534.787,00**	**821.664.888,00**	**95,88%**	**75,00%**	

Sumber data : Apliokasi E- monev / Bagian Keuangan rilis tahun 2025

Persentasi realisasi anggaran perangkat daerah di dapat melalui aplikasi si monev yang di evaluasi setiap bulan

Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 19.512.226.675,00

Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : Rp. 19.949.199.675,00

Realisasi : Rp. 19.127.534.787,00

Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 821.664.888,00

3. **Indeks Profesionalitas ASN**, dengan Nilai 87,40 (Tinggi) dari target 85,50 (Tinggi) dan tingkat capaian sebesar 102 % dengan predikat **Sangat Tinggi.**
   Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabatannya.

TABEL 3.2.a.11

NILAI IP ASN DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2025 :

TAHUN	NILAI
2021	72,27 (Sedang)
2022	86,15 (Tinggi)
2023	86,15 (Tinggi)
2024	85,46 (Tinggi)
2025	87,40 (Tinggi)

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian rilis tahun 2025

TABEL 3.2.a.11

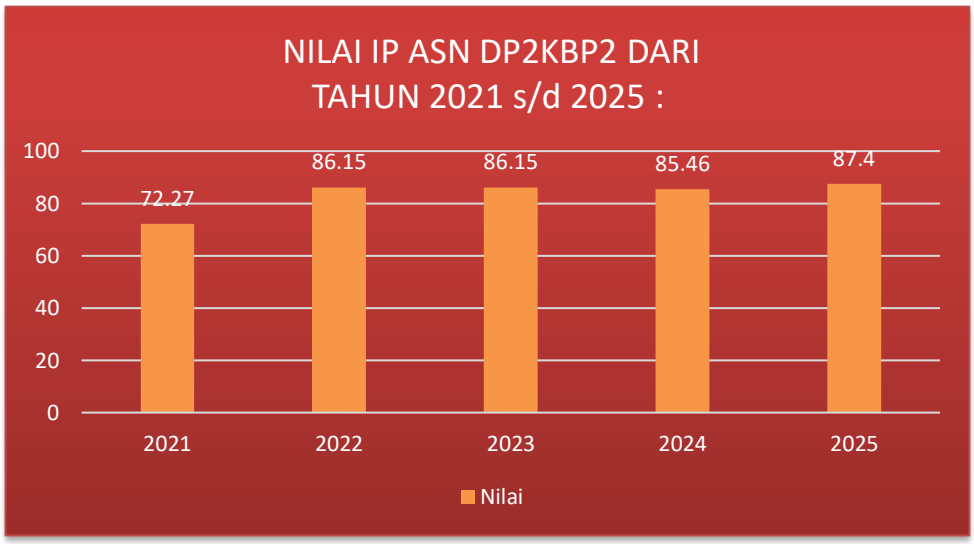

c. **Sasaran strategis 3** : "Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan **Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah**" dengan Indikator, Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan 1 inovasi dan tingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

- DP2KBP2 mempunyai inovasi berupa layanan online dengan nama RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi Korban Kekerasan pada

Perempuan dan Anak secara online) Versi 1, pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk.

- DP2KBP2 mempunyai inovasi berupa layanan online dengan nama RANGKUL KOREK PACARE SI SABAR (Ruang Pengaduan dan Konsultasi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak secara online melalui system scan *barcode*) Versi 2, pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta barcode atau link pengaduan https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk.
- Dalam keadaan emergency korban bisa melapor secara cepat dan bisa dilayani dengan cepat sesuai keinginan korban. Tanpa harus datang ke sekretariat UPTD PPA terlebih dahulu.

GAMBAR 3.2.a.12

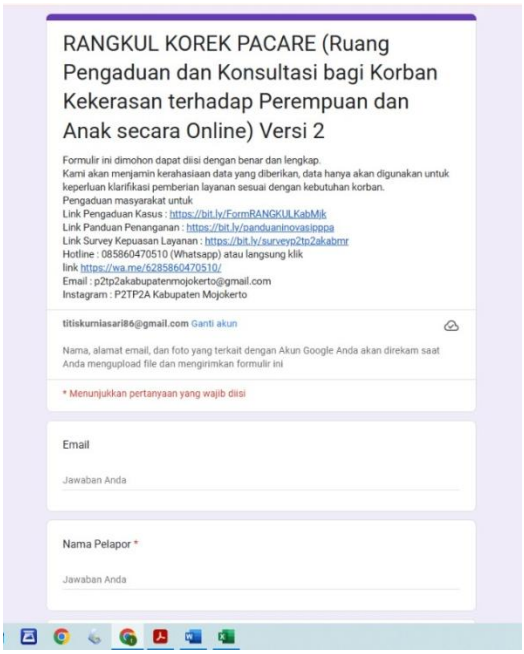

TABEL 3.2.b
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2025 Periode Perencanaan 2025 – 2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PAPBD Tahun 2025	Realisasi PAPBD Tahun 2025	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender yang Berkualitas	I bangga	65,11	-	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07 %	80,50 %	100 %	Sangat Tinggi	Bidang KB
2.		IPG	91,84	91,84	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15 %	89,45 %	101 %	Sangat Tinggi	Bidang PPKS
3.					Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG
4.					Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PA
5,					Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78 %	12,73 %	108 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG
6.					Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60	85,62	101 %	Sangat Tinggi	Sekretariat

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 Periode Perencanaan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 : "Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana" dengan indikator :

- ✓ **Presentase Kepesertaan KB,** PAPBD tahun 2025 terealisasi sebesar 80,50 % dari Target 80,07 dan 67ingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**. Perhitungan Prevalensi KB Aktif sebesar 80,50 % diperoleh dari :

$$\frac{Jumlah\ Peserta\ Aktif\ (PA)}{Jumlah\ \ Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)}\ x\ 100\%$$

TABEL 3.2.b.1
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2025

NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JML	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2025		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.591	8.056	698	550	1	464	588	3.008	1.144	6.453	140,56	1.837	28,47	80,10
2	GONDANG	5.912	9.556	1.691	730	30	12	2.070	2.697	846	8.076	136,60	4.521	55,98	84,51
3	PACET	8.527	13.458	2.080	630	11	11	2.327	4.530	1.266	10.855	127,30	5.048	46,50	80,66
4	TRAWAS	3.878	6.362	455	412	3	38	734	2.815	643	5.100	131,51	1.604	31,45	80,16
5	NGORO	10.896	17.530	1.656	1.164	11	364	1.382	6.581	2.867	14.025	128,72	4.213	30,04	80,01
6	PUNGGING	8.643	14.323	1.258	434	9	133	589	7.853	1.127	11.403	131,93	2.290	20,08	79,61
7	KUTOREJO	7.260	11.792	548	389	3	240	1.245	4.524	2.697	9.646	132,87	2.185	22,65	81,80
8	MOJOSARI	7.973	13.245	2.906	1.166	15	492	1.318	3.361	1.408	10.666	133,78	5.405	50,68	80,53
9	DLANGGU	7.956	10.143	968	790	27	45	851	4.560	942	8.183	102,85	2.636	32,21	80,68
10	BANGSAL	5.999	9.583	657	413	5	327	682	4.719	967	7.770	129,52	1.757	22,61	81,08
11	PURI	8.720	13.948	1.385	765	17	844	2.074	3.940	2.292	11.317	129,78	4.241	37,47	81,14
12	TROWULAN	7.076	12.731	699	645	11	117	956	5.610	1.645	9.683	136,84	2.311	23,87	76,06
13	SOOKO	9.414	15.328	2.023	865	4	406	971	6.635	1.365	12.269	130,33	3.863	31,49	80,04
14	GEDEG	5.332	9.151	791	592	2	406	511	3.892	1.135	7.329	137,45	1.896	25,87	80,09
15	KEMLAGI	7.048	11.232	919	819	37	245	1.323	4.975	897	9.215	130,75	3.098	33,62	82,04
16	JETIS	12.079	19.596	1.197	701	62	630	1.337	9.258	2.268	15.453	127,93	3.297	21,34	78,86
17	DAWARBLANDONG	5.890	8.855	361	343	6	89	874	4.744	1.081	7.498	127,30	1.584	21,13	84,68
18	MOJOANYAR	5.622	9.101	973	518	10	213	914	3.508	1.193	7.329	130,36	2.415	32,95	80,53
	KABUPATEN	132.816	213.990	21.265	11.926	264	5.076	20.746	87.210	25.783	172.270	129,71	54.201	31,46	80,50

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk rilis tahun 2026 bulan januari

TABEL 3.2.b.2

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2025
1	IUD	21.265
2	MOW	11.926
3	MOP	264
4	Kondom	5.076
5	Implant	20.746
6	Suntik	87.210
7	Pil	25.783
	TOTAL	172.270

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk rilis tahun 2026 bulan januari

GAMBAR 3.2.b.2

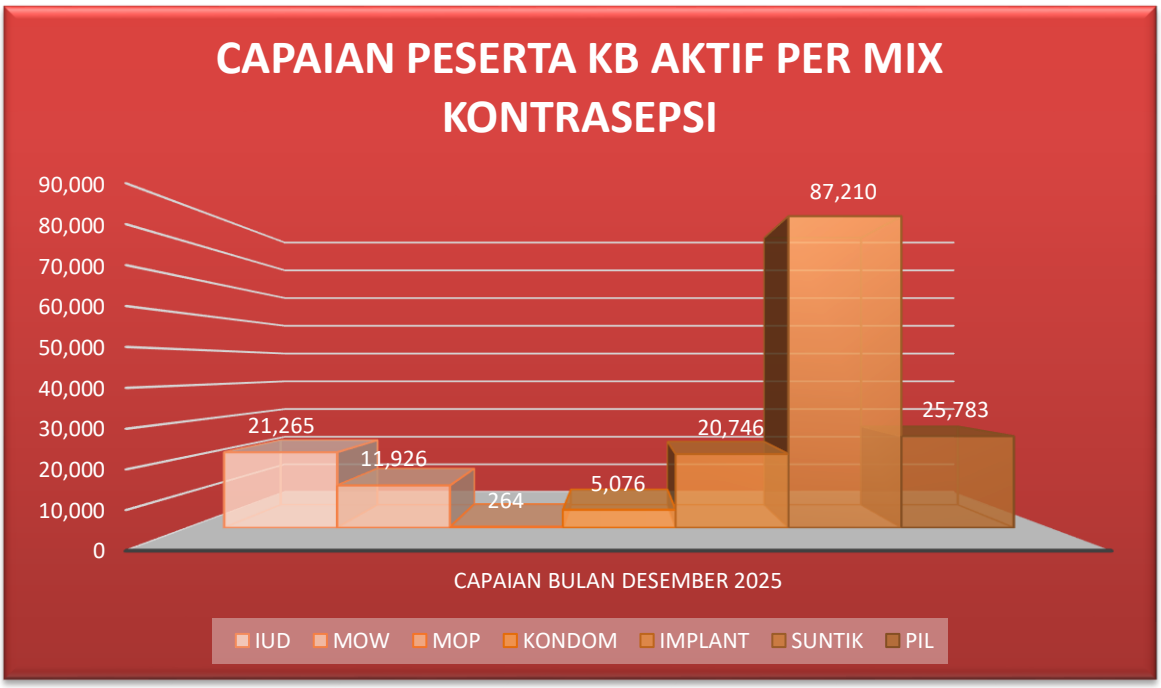

TABEL 3.2.b.3

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 s/d 2025

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2020	245.061	197.565	80,62
2.	2021	247.373	199.545	80,67
3.	2022	227.174	183.388	80,73
4.	2023	230.204	184.695	80,23
5.	2024	225.684	180.682	80,06
6.	2025	213.990	172.270	80,50

Sumber Data :Bidang Pengendalian Penduduk rilis tahun 2026 bulan januari

GAMBAR 3.2.b.3

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Menurunnya unmet need (pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi) Tahun 2025 ;
  - Kurang nya Kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
  - Kurangkanya kepesertaan KB Aktif;
  - Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
  - Belum optimalnya evaluasi kinerja kepada penyuluh KB serta kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Rencana tindaklanjut :

- Dilakukan Sosialisasi KB dengan sasaran Pasangan Usia Subur;
- Dilakukan pelayanan KB Kepada PUS anmet need dan sosialisasi KB MKJP;
- Dilakukan pelatihan SDM bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD;
- Dilakukan pelatihan SDM bagi petugas medis; dan
- Pendistribusian alokon ke faskes – faskes tepat waktu.

b. Sasaran strategis 2 : "Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto" dengan indikator :

✓ **Presentase Keluarga Beresiko Stunting yang di damping**, PAPBD tahun 2025 terealisasi sebesar 89,45 % dari Target 88,15 % dan tingkat capaian sebesar 101 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Presentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi sebesar 89,45 % diperoleh dari :

$$\frac{Jumlah\ Keluarga\ Resiko\ Stunting\ yang\ di\ dampingi}{Jumlah\ \ Keluarga\ Resiko\ Stunting} \quad x\ 100\%$$

TABEL 3.2.b.4
PRESENTASE KRS YANG DI DAMPINGI TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	CATIN			IBU HAMIL			PASCAPERSALINAN			BADUTA USIA 0-23			TOTAL SASARAN	TOTAL PENDAMPINGAN	%
		SASARAN	TERDAMPINGI	PROSENTASE	SASARAN	TERDAMPINGI	PROSENTASE	SASARAN	TERDAMPINGI	PROSENTASE	SASARAN	TERDAMPINGI	PROSENTASE			
1	JATIREJO	361	306	84.76	517	415	80.27	184	183	99.46	565	561	99.29	1627	1465	90.04
2	GONDANG	273	231	84.62	619	478	77.22	170	163	95.88	678	654	96.46	1740	1526	87.70
3	PACET	179	150	83.80	591	498	84.26	109	106	97.25	459	457	99.56	1338	1211	90.51
4	TRAWAS	89	78	87.64	234	201	85.90	63	61	96.83	251	243	96.81	637	583	91.52
5	NGORO	387	242	62.53	643	564	87.71	178	177	99.44	457	450	98.47	1665	1433	86.07
6	PUNGGING	564	433	76.77	678	562	82.89	257	254	98.83	705	690	97.87	2204	1939	87.98
7	KUTOREJO	430	334	77.67	870	554	63.68	310	308	99.35	1235	1214	98.30	2845	2410	84.71
8	MOJOSARI	231	162	70.13	507	432	85.21	149	147	98.66	726	722	99.45	1613	1463	90.70
9	DLANGGU	272	206	75.74	252	214	84.92	50	50	100.00	208	207	99.52	782	677	86.57
10	BANGSAL	297	232	78.11	661	571	86.38	227	219	96.48	621	612	98.55	1806	1634	90.48
11	PURI	209	145	69.38	816	710	87.01	192	188	97.92	703	694	98.72	1920	1737	90.47
12	TROWULAN	420	377	89.76	1184	987	83.36	478	478	100.00	1414	1378	97.45	3496	3220	92.11
13	SOOKO	299	228	76.25	884	769	86.99	233	230	98.71	1177	1176	99.92	2593	2403	92.67
14	GEDEG	216	154	71.30	401	341	85.04	100	98	98.00	419	390	93.08	1136	983	86.53
15	KEMLAGI	195	159	81.54	416	356	85.58	76	76	100.00	216	215	99.54	903	806	89.26
16	JETIS	565	467	82.65	1174	971	82.71	427	427	100.00	835	835	100.00	3001	2700	89.97
17	DAWARBLANDONG	246	204	82.93	654	560	85.63	247	243	98.38	788	785	99.62	1935	1792	92.61
18	MOJOANYAR	318	247	77.67	470	341	72.55	190	190	100.00	579	578	99.83	1557	1356	87.09
MOJOKERTO		5.551	4.355	78.45	11.571	9.524	82.31	3.640	3.598	98.85	12.036	11.861	98.55	**32.798**	**29.338**	**89.45**

Sumber Data : Bidang PPKS rilis tahun 2026 bulan januari

GAMBAR 3.2.b.4.a

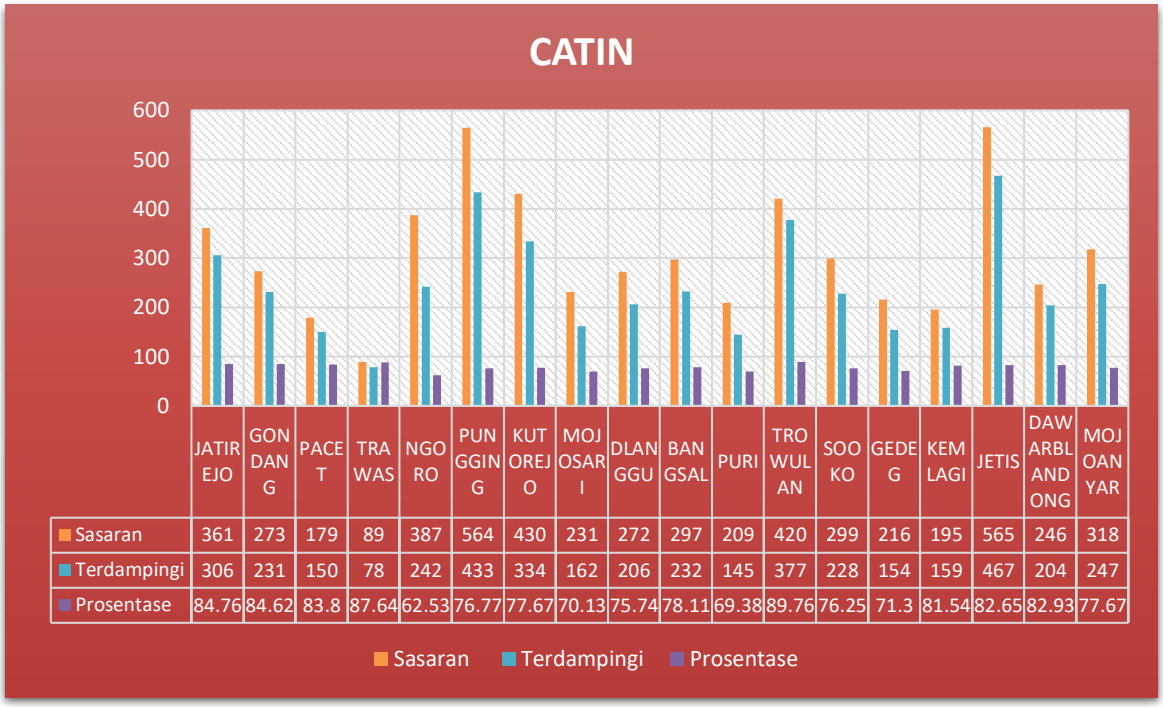

GAMBAR 3.2.b.4.b

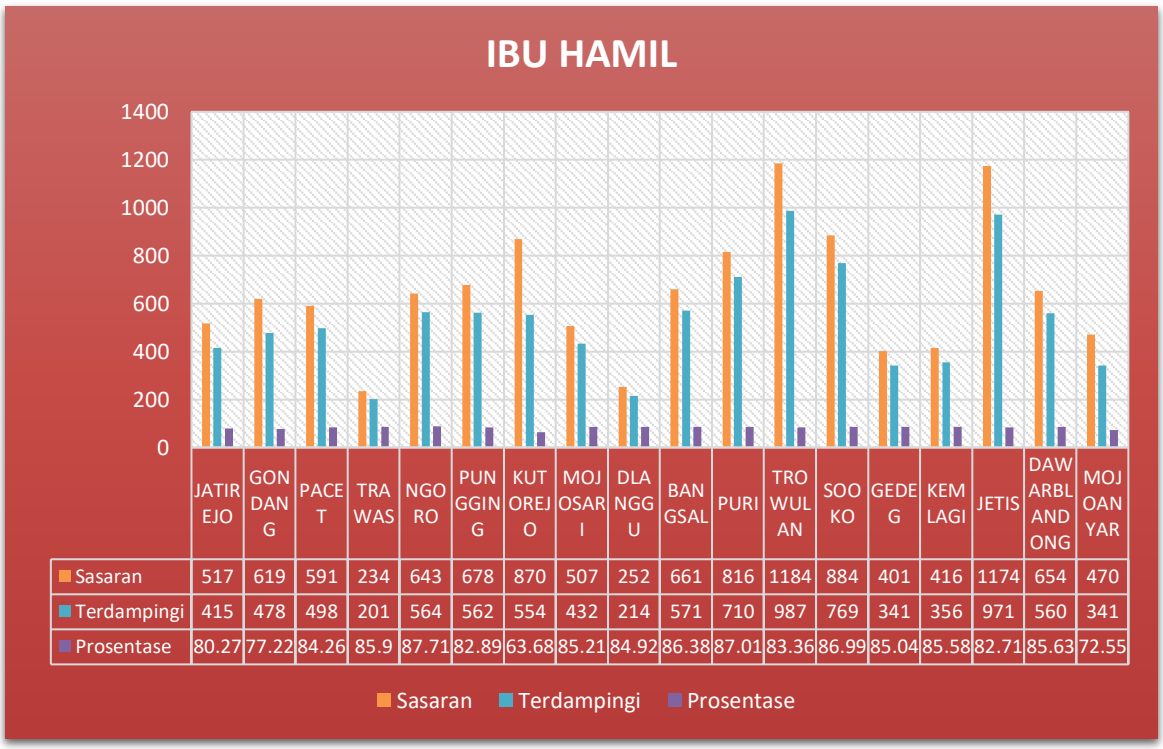

GAMBAR 3.2.b.4.c

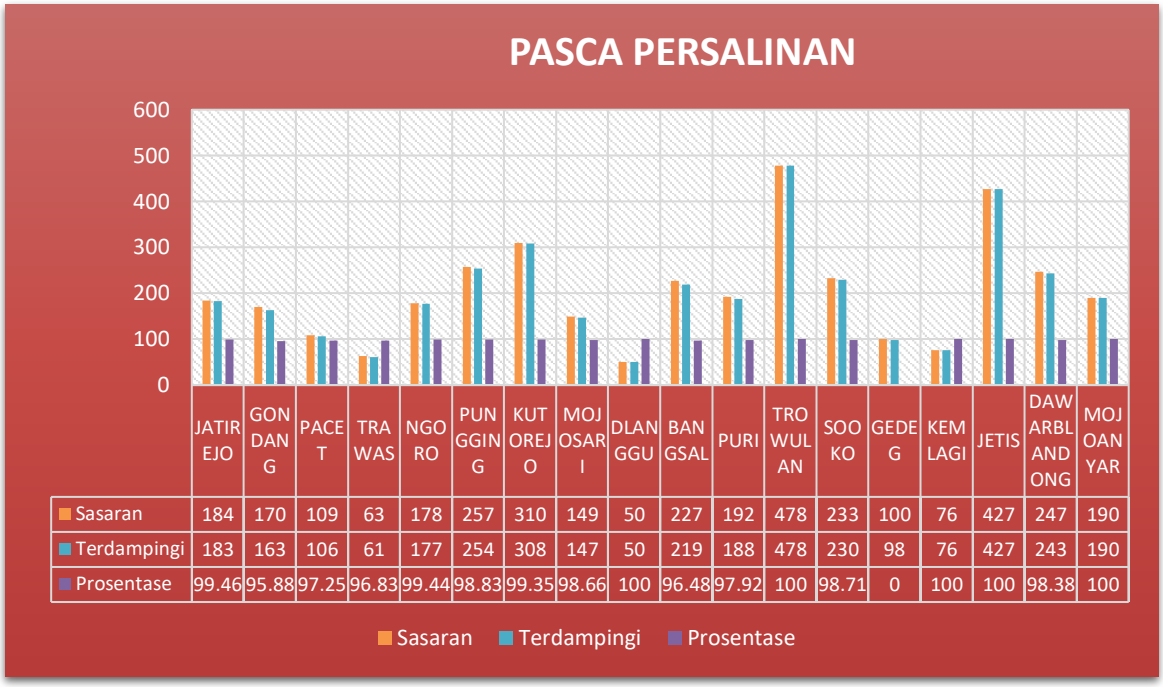

GAMBAR 3.2.b.4.d

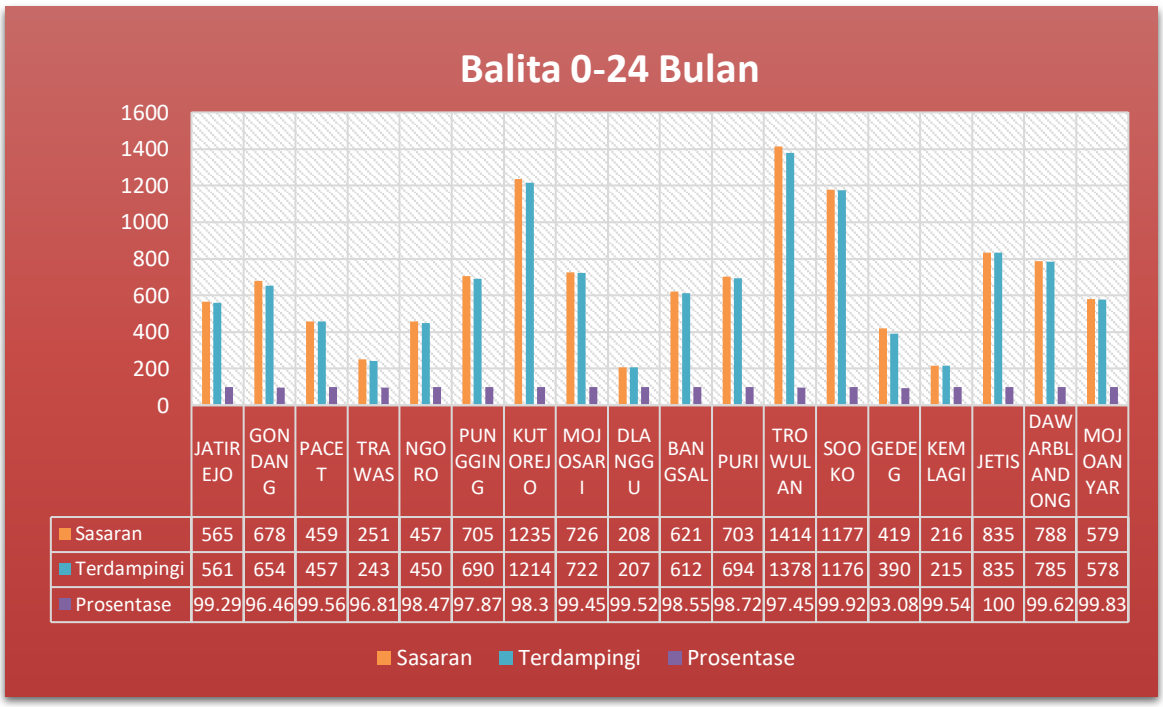

GAMBAR 3.2.b.4.e

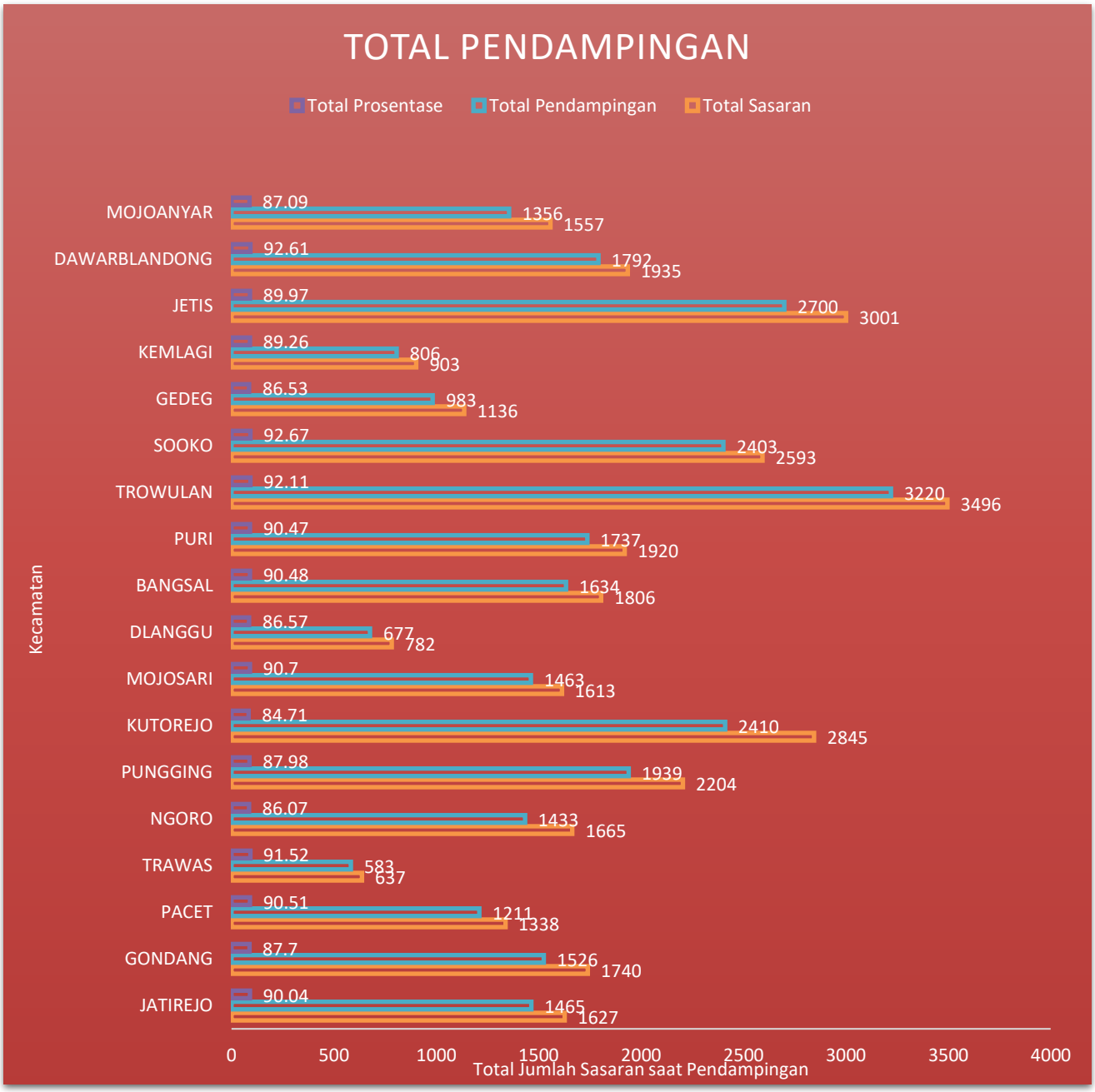

Dari data di atas Jumlah keluarga beresiko stunting yang di damping sebesar 29.338 dari sasaran 32.798 keluarga berdasarkan jenis pendampingan calon pengantin sebanyak 4.355 orang dari sasaran 5.551 orang, ibu hamil sebanyak 9.524 orang dari sasaran 11.571 orang, pasca persalinan 3.598 orang dari sasaran 3.640 orang, dan baduta usia 0 – 23 bulan sebanyak 11.861 anak dari sasaran 12.036 anak.

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Kekurangan kesadaran keluarga tentang stunting.
- Keterbatasan akses layanan kesehatan.

- Gizi buruk dan praktik pemberian makan tidak tepat.
- Faktor ekonomi dan pendidikan rendah.
- Sulitnya mengubah perilaku hidup sehat.

Rencana Tindak Lanjut :

- Edukasi intensif tentang stunting dan pencegahannya.
- Kolaborasi dengan kader kesehatan dan posyandu.
- Bantuan paket gizi dan akses layanan kesehatan.
- Pelatihan keterampilan hidup sehat dan pengelolaan keuangan.
- Pendekatan keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.

c. Sasaran strategis 3 : "Meningkatnya Perlindungan Perempuan" dengan indikator :

✓ **Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan,** PAPBD tahun 2025 terealisasi sebesar 100 % dari Target 100 % dan tingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan sebesar 100 % diperoleh dari :

$$\frac{Jumlah\ Korban\ yang\ terselesaikan}{Jumlah\ Korban} \quad x\ 100\%$$

TABEL 3.2.b.5
KORBAN PEREMPUAN YANG TERSELESAIKAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN PEREMPUAN	Kategori Kasus				
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	lainnya
1.	JATIREJO	1	0	0	1	0	0
2.	GONDANG	2	0	1	1	0	0
3.	PACET	0	0	0	0	0	0
4.	TRAWAS	0	0	0	0	0	0
5.	NGORO	0	0	0	0	0	0
6.	PUNGGING	1	0	0	0	0	1
7.	KUTOREJO	0	0	0	0	0	0
8.	MOJOSARI	3	2	0	1	0	0
9.	DLANGGU	1	0	0	1	0	0
10.	BANGSAL	1	0	1	0	0	0
11.	PURI	3	3	0	0	0	0
12.	TROWULAN	2	2	0	0	0	0
13.	SOOKO	3	1	2	0	0	0
14.	GEDEG	1	0	0	1	0	0
15.	KEMLAGI	0	0	0	0	0	0
16.	JETIS	3	1	1	0	0	1
17.	DAWAR BLANDONG	1	0	0	1	0	0
18.	MOJOANYAR	2	2	0	0	0	0
JUMLAH		**24**	**11**	**5**	**6**	**0**	**2**

Sumber Data : UPTD PPA/ Bidang PPPUG rilis tahun 2025

Dari data di atas Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang melapor ke UPTD sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan telah di tangani sebanyak 24 Kasus, kekerasan fisik 11 orang, psikis 5 orang, kekerasan seksual 6 orang, dan eksploitasi 2 orang dari semua korban yang melapor ke UPTD PPA semua telah di berikan layanan dan pendampingan sesuai yang di butuhkan oleh korban.

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Korban terkadang merasa malu untuk melaporkan kasus yang menimpanya, karena beranggapan kasus itu merupakan aib bagi korban dan keluarganya.
- Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan belum lengkap (identitas kependudukan) sehingga memperlambat proses adminitrasi penanganan.
- Sering korban terlambat lapor, sehingga mempengaruhi dalam proses pembuktian contohnya visum dll.
- Belum tersedianya rumah aman sehingga jika ada korban yang memerlukan menginap di rumah anam harus di kirim ke villa durian doa, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih lama.

Rencana Tindak Lanjut :

- Sosialisasi keluarga sadar hukum terkait edukasi kepada masyarakat dalam masalah pengetahuan hukum.
- Persaratan yang belum lengkap bisa mengirimkan data yang belum lengkap memalui hotline UPTD PPA Nomor 085860470510.
- Menyiapkan Mou antara UPTD PPA dengan villa durian doa.

d. Sasaran strategis 4 : "Meningkatnya Perlindungan Anak" dengan indikator :

- ✓ **Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan**, PAPBD tahun 2025 terealisasi sebesar 100 % dari Target 100 % dan tingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi.

  Perhitungan Presentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan sebesar 100 % diperoleh dari :

$$\frac{Jumlah\ Korban\ yang\ terselesaikan}{Jumlah\ Korban} \quad x\ 100\%$$

TABEL 3.2.b.6
KORBAN ANAK YANG TERSELESAIKAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN ANAK	Kategori Kasus						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	lainnya
1.	JATIREJO	1	0	0	1	0	0	0	0
2.	GONDANG	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PACET	5	0	0	3	0	0	1	1
4.	TRAWAS	1	0	0	1	0	0	0	0
5.	NGORO	3	1	1	1	0	0	0	0
6.	PUNGGING	2	0	0	2	0	0	0	0
7.	KUTOREJO	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	MOJOSARI	4	1	2	0	0	0	0	1
9.	DLANGGU	1	0	0	0	0	0	0	1
10.	BANGSAL	1	0	0	1	0	0	0	0
11.	PURI	3	0	1	1	0	0	1	0
12.	TROWULAN	2	0	0	2	0	0	0	0
13.	SOOKO	4	0	1	1	0	0	0	2
14.	GEDEG	1	1	0	0	0	0	0	0
15.	KEMLAGI	2	1	0	1	0	0	0	0
16.	JETIS	4	0	0	3	0	0	0	1
17.	DAWAR BLANDONG	1	1	0	0	0	0	0	0
18.	MOJOANYAR	1	0	0	1	0	0	0	0
JUMLAH		**36**	**5**	**5**	**18**	**0**	**0**	**2**	**6**

Sumber data : UPTD PPA / bidang PA rilis tahun 2025

Dari data di atas Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang melapor ke UPTD sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan telah di tangani sebanyak 36 Kasus, kekerasan fisik 5 anak, psikis 5 anak, seksual 18 anak, penelantaran 2 anak dan kekerasan lainnya 6 orang orang dari semua korban yang melapor ke UPTD PPA semua telah di berikan layanan dan pendampingan sesuai yang di butuhkan oleh korban.

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Korban terkadang merasa malu untuk melaporkan kasus yang menimpanya, karena beranggapan kasus itu merupakan aib bagi korban dan keluarganya.
- Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan belum lengkap (identitas kependudukan) sehingga memperlambat proses adminitrasi penanganan.
- Sering korban terlambat lapor, sehingga mempengaruhi dalam proses pembuktian contohnya visum dll.
- Belum tersedianya rumah aman sehingga jika ada korban yang memerlukan menginap di rumah anam harus di kirim ke villa durian doa, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih lama.

Rencana Tindak Lanjut :

- Sosialisasi di sekolah – sekolah terkait bulying.
- Persaratan yang belum lengkap bisa mengirimkan data yang belum lengkap memalui hotline UPTD PPA Nomor 085860470510.
- Penguatan koordinasi dengan OPD terkait (dinsos, RS, Dinas Pendidikan, pengadilan agama, kepolisian)

e. Sasaran strategis 5 : "Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender" dengan indikator :

✓ **Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG,** PAPBD tahun 2025 terealisasi sebesar 12,73 % dari Target 11,78 % dan tingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Perhitungan Presentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG sebesar 108 % diperoleh dari :

$$\frac{Jumlah\ ARG\ Pada\ Belanja\ Operasional\ dan\ Modal\ APBD}{Jumlah\ Seluruh\ Belanja\ Operasional\ dan\ Modal\ APBD}\ x\ 100\%$$

TABEL 3.2.b.7
PERANGKAT DAERAH YANG TELAH ARG

NO	NAMA OPD	ANGGARAN
1	2	3
1	Bagian Pemerintahan	275.000.000
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	280.624.650
3	Bagian Administrasi Pembangunan	350.446.532
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	175.075.000
5	Bagian Umum	697.716.000
6	Bagian Organisasi	95.000.000
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	589.759.715
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	33.380.000
9	Sekretariat DPRD	2.400.000.000
10	Inspektorat	26.840.000
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	700.000.000

12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	807.003.152
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	111.000.000
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30.000.000
15	Dinas Lingkungan Hidup	6.000.000
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.586.000.000
17	DPMPTSP	25.000.000
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000
19	Badan Pendapatan Daerah	237.605.760
20	Dinas Sosial	120.988.867
21	Dinas Pendidikan	750.000.000
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000
23	Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	200.000.000
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.072.189.764
25	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100.000.000
26	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	504.177.500
27	Dinas Tenaga Kerja	15.000.000
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.200.000
29	Dinas Kesehatan	5.547.099.781
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.000.000
31	Dinas Pangan dan Perikanan	40.000.000
32	RSUD Prof. Dr. Soekandar	70.000.000
33	RSUD RA. Basoeni	65.000.000.000
34	Satuan Polisi Pamong Praja	800.000.000
35	Kec. Puri	33.016.200
36	Kec. Sooko	16.500.000
37	Kec. Trowulan	15.019.680
38	Kec. Bangsal	27.313.250

39	Kec. Gedeg	8.723.500
40	Kec. Kemlagi	10.200.000
41	Kec. Jetis	10.200.000
42	Kec. Dawarblandong	42.036.650
43	Kec. Pacet	92.500.000
44	Kec. Pungging	6.200.000
45	Kec. Ngoro	16.730.000
46	Kec. Kutorejo	3.650.000
47	Kec. Trawas	15.400.000
48	Kec. Gondang	40.000.000
49	Kec. Jatirejo	10.000.000
	TOTAL	**150.771.178.702**

Sumber data bidang PPPUG rilis tahun 2025

Dari data di atas Jumlah *Jumlah ARG Pada Belanja Operasional dan Modal APBD* sebesar Rp.150.771.178.702,00 di dapat dari 49 Perangkat Daerah sedangkan *Jumlah Seluruh Belanja Operasional dan Modal APBD* sebesar Rp. 1.184.113.154.769,00 x 100 % = 12,73 %

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Masih ada Perangkat Daerah yang belum membuat Anggaran Responsif Gender.
- Kurangnya Pemahaman tentang Anggaran Responsif Gender.
- Keterbatasan SDM dan Kapasitas serta kebijakan Teknis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Pelatihan dan Sosialisasi Anggaran Responsif Gender.
- Evaluasi Monitoring kepada Perangkat Daerah terkait.
- Perangkat Daerah menindak lanjuti untuk membuat kebijakan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan PUG di masing – masing Perangkat Daerah.

f. **Sasaran Strategis 6** "Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator :

- ✓ **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, dengan Nilai 85,62 (A) dari target 84,60 (A) dan tingkat capaian sebesar 101,20% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

  Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh Inpektorat

NILAI SAKIP DP2KBP2 DARI TAHUN 2025

Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	25,35
b. Pengukuran Kinerja	30,00	26,10	26,73
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,45	13,29
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50	20,25
Jumlah	**100,00**	**84,55**	**85,62**

Tabel 3.2.c
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2021 – 2026 berdasarkan renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Peremuan Perlindungan Anak serta Kelauraga Berencana	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Di dapat dari 3 komponen kunci : 4. Pelembagaan PUG 5. Penyelenggaraan PUG 6. Inovasi PUG	APE Madya	APE Madya	APE Utama	APE Mentor	APE Mentor	APE Mentor
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	Berdasarkan 5 Klaster : 6. Hak Sipil dan Kebebasan 7. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 8. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 9. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya 10. Perlindungan Khusus	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Utama	KLA Utama
		Pravelensi KB Aktif	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Aktif\ (PA)}{Jumlah\ \ Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)} x\ 100\%$	80,62%	80,56%	80,57%	80,58%	80,59%	80,60%
		Presentase Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteran keluarga	$\frac{Jumlah\ Keluarga\ yang\ ikut\ kelompok\ ketahanan\ dan\ kesejahteraan\ keluarag}{Jumlah\ \ sasaran\ kelompok\ ketahanan\ dan\ kesejahteraan\ keluarga} x\ 100\%$	72,94%	72,96%	72,97%	72,98%	72,99%	73,00%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh Inpektorat		83,78 (A)	84,28 (A)	84,50 (A)	84,65 (A)	84,80 (A)
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{Jumlah\ Realisasi\ Anggaran\ Perangkat\ Daerah}{Jumlah\ Anggaran\ Perangkat\ Daerah} x\ 100\%$		86,00 %	87,00 %	96,50 %	96,55 %	96,60 %
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya		70,00 (Sedang)	70,00 (Sedang)	86,20 (Tinggi)	86,25 (Tinggi)	86,30 (Tinggi)
3.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi

Table 3.2.d
Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2025 – 2029 berdasarkan renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1			3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Aktif\ (PA)}{Jumlah\ \ Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)} x\ 100\%$	80,07%	80,08%	80,09%	80,10%	80,11%	80,12%

	yang Berkualitas	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di damping	$\frac{Jumlah\ Keluarga\ Resiko\ Stunting\ yang\ di\ Dampingi}{Jumlah\ \ Keluarga\ Resiko\ Stunting} x\ 100\%$	88,15%	89,00%	89,10%	89,20%	89,30%	89,40%
		Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	$\frac{Jumlah\ Korban\ Yang\ Terselesaikan}{Jumlah\ \ Korban} x\ 100\%$	100%	100%	80,57%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	$\frac{Jumlah\ Korban\ Yang\ Terselesaikan}{Jumlah\ \ Korban} x\ 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	$\frac{Jumlah\ ARG\ Pada\ Belanja\ Operasional\ dan\ Modal\ APBD}{Jumlah\ \ Seluruh\ Belanja\ Operasional\ dan\ Modal\ APBD} x\ 100\%$	11,80 %	11,85 %	11.90 %	11.95%	12.00%	12.05%
		Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah di dapat dari hasil evaluasi inspektorat : 1. Komponen Perencanaan Kinerja 30,00 2. Pengukuran Kinerja 30,00 3. Pelaporan Kinerja 15,00 4. Evaluasi Internal 25,00	84,60(A)	84,61(A)	84.62(A)	84,63(A)	84,64(A)	84,65(A)

Analisis dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025 – 2029 ada 6 indikator :

1. Prosentase Kepesertaan Keluarga Berencana :

   Berdasarkan data di atas di harapkan prosentase kepesertaan KB naik dari besline tahun 2024 sebesar 80,06 %, sampai dengan tahun 2030 naik menjadi 80,12 %.

2. Prosentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi :

   Berdasarkan data di atas Prosentase Keluarga Beresiko Stunting tahun 2024 sebesar 88,15 %, dari sasaran keluarga resiko stunting 18.825 keluarga sedangkan keluarga yang telah di dampingi sebesar 16.596 keluarga, di harapkan sampai dengan tahun 2030 keluarga yang di dampingi di Kabupaten Mojokerto naik menjadi 89,40 % Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Terselesaikan

   Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang melapor ke UPTD sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan telah di tangani sebanyak 21 Kasus, kekerasan fisik 9 orang, psikis 5 orang, kekerasan seksual 6 orang, dan eksploitasi 1 orang dari semua korban yang melapor ke UPTD PPA semua telah di berikan layanan dan pendampingan sesuai yang di butuhkan oleh korban.

3. Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan

   Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang melapor ke UPTD sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan telah di tangani sebanyak 33 Kasus, kekerasan fisik 5 anak, psikis 5 anak, seksual 16 anak, penelantaran 2 anak dan kekerasan lainnya 2 orang orang dari semua korban yang melapor ke UPTD PPA semua telah di berikan layanan dan pendampingan sesuai yang di butuhkan oleh korban.

4. Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG

   Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara terpadu baik secara lintas sektoral pemerintah maupun dengan melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal Pemerintah. Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di daerah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu : Aspek Komitmen dan Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya, Aspek Profil Gender dan Data Terpilah, serta Aspek Partisipasi Masyarakat. Dalam hal ini Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan, telah meningkatkan pembinaan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, arah kebijakan yang di lakukan, Melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)(Sumber Data Bidang Perlindungan Perempuan dan PUG).

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah di dapat dari hasil evaluasi inspektorat : (Sumber Data DP2KBP2). (Sumber secretariat/inspektorat)
    a. Komponen Perencanaan Kinerja 30,00
    b. Pengukuran Kinerja 30,00
    c. Pelaporan Kinerja 15,00
    d. Evaluasi Internal 25,00

Table 3.2.e
Perbandingan Realisasi Kinerja Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2021 – 2025 berdasarkan renstra

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,19 (A)	83,87 (A)	84.42 (A)	84,55 (A)	85,62 (A)
2.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif	72,41%	66,67%	73,68%	100%	100%
3.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	1,32%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data terpilih Gender dan Anak	89,58%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak	1,97%	72,37%	100%	100%	100%
			Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	22,22%	100%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan Layanan	57,58%	100%	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%

9.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,52%	80,73%	80,23%	80,06%	80,50%
10.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	97,70%	95,49%	96,96%	98,98%	99,03%

Table 3.2.f
Perbandingan Realisasi Kinerja Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2025 – 2029 berdasarkan renstra

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI	
				2024	2025
1.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,55 (A)	85,62 (A)
2.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif	100%	100%
3.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	100%
4.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100%	100%
5.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data terpilih Gender dan Anak	100%	100%
6.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	100%
			Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	100%	100%

7.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan Layanan	100%	100%
8.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%	100%
9.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,06%	80,50%
10.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	98,98%	99,03%
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	85,62 (A)
12.	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	-	12,73%
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	
13.	Meningkatnya perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	-	100%
14.	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berprespektif Gender dan Hak Anak sesuai Standart	-	3 Orang
15.	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyususnan Kebijakan	-	57 PD
16.	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	

17.	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	-	100%
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-	63,83
18.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	-	1,95
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 (Age Specific Fertility Rate / ASFR (15-19)	-	14,80
19.	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern contraceptive (mCPR)	-	80,50%
			Prevalensi Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (Unmed Need)	-	7,79 %
20.	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-	89,86%

III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan nasional untuk indikator pada urusan perencanaan serta perbandingan dengan Propinsi Jawa Timur dan Nasional pada urusan Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang memiliki indikator kinerja sejenis.

Tabel 3.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Daerah Sekitar/Pemda/Nasional

NO.	Indikator Kinerja			Realisasi 2025			Keterangan
	Pemda	Prop Jatim	Nasional	Pemda	Prop Jatim	Nasional/ kementrian /Lembaga	
1.	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Utama	-	Penghargaan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE) di keluarkan oleh Keputusan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 246 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023 (Tahun 2025 tidak ada evaluasi APE) untuk penerimaan kategori Nasional/kementrian/lembaga di buat sample dari kementrian Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional/BKKBN
2.	Kabupaten Layak nak (KLA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	Provila	-	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di keluarkan oleh Keputusan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

III.4 Perbandingan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan DP2KBP2 Tahun 2025

Tabel 3.4.1

Perbandingan Nilai SAKIP Pemda dengan DP2KBP2

No.	Nilai sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	Nilai sakip DP2KBP2 Tahun 2025
1.	75,67	85,62

Sumber Data Organisasi

Bersadarkan data di atas dapat di lihat Nilai Sakip Pemerinah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebesar 75,67 (BB) , sedangkan nilai Sakip Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebesar 85,62 (A).

Gambar 3.4.1

Perbandingan Nilai SAKIP Pemda dengan DP2KBP2

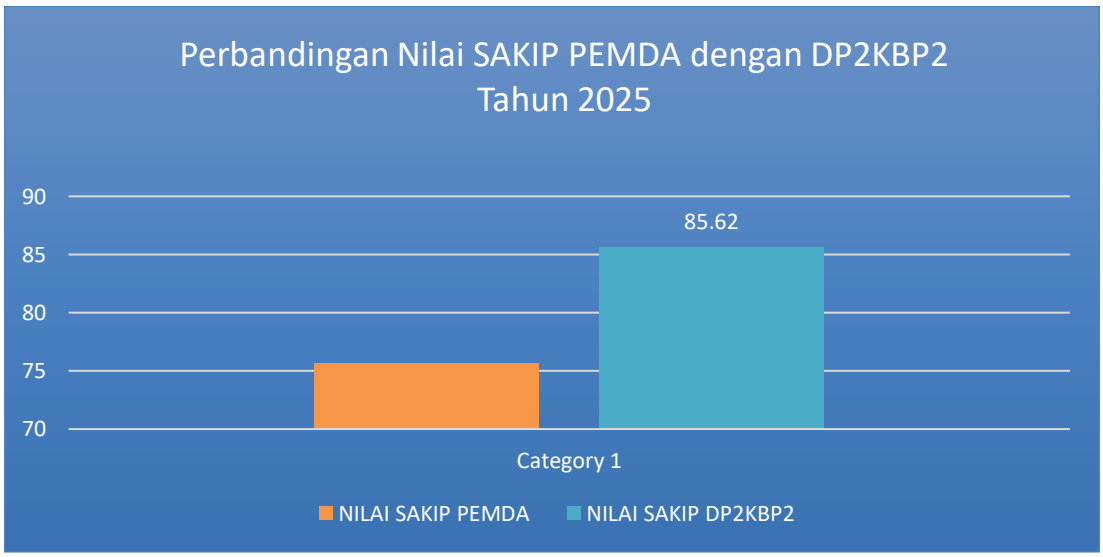

III.5 Prestasi Kerja Lainnya

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN	BIDANG	TINGKAT	JENIS PENGHARGAAN	DOKUMENTASI (PIAGAM ATAU PIALA TERLIHAT JELAS)	DOKUMENTASI (PADA SAAT PENERIMAAN)
1	DP2KBP2	2025	PEMBINAAN KB	PROVINSI	JUARA III PASANGAN KB LESTARI 20 TAHUN (NINGRUM SUMARTINI & MUJIANTO) APRESIASI TENAGA LINI LAPANGAN TERBAIK		
2	DP2KBP2	2025	DALDUK	PROVINSI	TERBAIK II MANAJEMEN DATA DAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2025		

3	**DP2KBP2**	**2025**	**PA**	**NASIONAL**	**PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK PERINGKAT NINDYA TAHUN 2025**		
4	**DP2KBP2**	**2025**	**BANGGA KENCANA**	**NASIONAL**	**PENGHARGAAN INTENSIF FISKAL TAHUN BERJALAN 2025 KATEGORI KINERJA PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MOJOKERTO**		

III.5 Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja DP2KBP2 maka perlu didukung anggaran program tahun 2025 dengan total alokasi belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 19.949.199.675,00 (Sembilan Belas Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi sebesar Rp. 19.624.144.375,00; dan
2. Belanja modal sebesar Rp. 325.055.300,00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL III.4
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Pemerintahan Urusan Daerah Kabupaten/Kota	5.289.213.925	4.909.138.592	95,21 %
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pmenberdayaan Perempuan	174.709.100	166.347.018	96,11 %
3	Program Perlindungan Perempuan	90.546.700	77.976.909	96,41 %
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	25.367.350	24.457.289	97,51 %
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	51.410.050	50.130.150	79,06 %
6	Program Perlindungan Khusus Anak	65.243.750	51.587.400	92,81 %
7	Program Pengendalian Penduduk	1.572.368.800	1.562.811.445	99,39 %
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.664.425.000	6.328.611.634	94,96 %
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	6.015.915.000	5.956.474.350	99,01 %

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

TABEL III.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07 %	80,50%	100,5 %	8.236.793.800	7.891.423.079	95,81 %
2.	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15 %	89,45 %	101 %	6.015.915.000	5.956.474.350	99,01 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100 %	100 %	100 %	90.546.700	77.976.909	96,41 %
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100 %	100 %	100 %	128.364.800	126.174.839	89,29 %
5.	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78 %	12,73 %	108 %	174.709.100	166.347.018	96,11 %
6.	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60	85,62	101 %	5.289.213.925	4.909.138.592	95,21 %
			Rata-rata capaian		100 %	Total capaian		95,30 %

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 95.30%, efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebesar 4,7 %.

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan :

1. Secara umum standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu UPTD PPA dapat tercapai 100 % , karena semua kasus yang ada semua mendapat penanganan, namun demikian tidak semua kasus harus mendapatkan pelayanan kesehatan , bimbingan rohani, pemulangan dan reintegrasi sosial. Hal ini karena korban belum dipandang perlu untuk diberikan layanan tersebut.
2. Secara umum standar pelayanan minimal bidang Keluarga Berencana dapat tercapai100 % bahkan melebihi dari target yang ditetapkan kecuali 1 indikator rasio petugas lapangan 2 desa untuk 1 PLKB, sementara satu PLKB rata – rata masih megang wilayah 5 desa.
3. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil verivikasi dan validasi data keluarga resiko stunting, dengan jumlah keluarga resiko 32.798 keluarga yang di dampingi sebanyak 29.338 dengan prosentase 89,45 %.

   Kegiatan berdampak pada balita berisiko stunting turun :

   a. Kegiatan Bina Keluarga Balita . Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dengan Kartu Kembang Anak Sinergi dengan Posyandu menggunakan KMS.
   b. Sekolah Orang tua Hebat untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan pengasuhan pada masa 1000 HPK.
   c. Ada kegiatan intervensi Pemberian PMT pada Bumil KEK, Balita Gizi Kurang, Gizi Buruk baik dari desa puskesmas.
   d. Sosialisasi dan pendampingan oleh TPK tentang promosi dan KIE pengasuhan pada masa 1000 HPK.
   e. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di desa yg bersinergi dengan PKK bersumber pangan local.
   f. Edukasi Pencegahan pernikahan usia dini melalui kelompok PIK remaja dan kelompok Bina Keluarga remaja.

4. Dari 2 urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab DP2KBP2 ada satu urusan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama tentang kasus pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang akhir – akhir ini semakin marak terjadi.
5. Capaian kinerja program prioritas DP2KBP2 dalam RPJMD tahun 2025 meliputi 2 urusan yaitu :
   - Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kinerjanya dapatdicapai 100 %
   - Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dicapai diatas 100 %
6. Walaupun realisasi anggaran (belanja langsung) tahun 2025 Rp. 19.949.199.675,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp. 19.127.534.787,00 atau 95,88 %. Namun demikian target kinerja secara umum dapat dicapai 100 % bahkan lebih.

B. Langkah-langkah Yang Akan Diambil :

-

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan pengelola KB, terutama petugas lapangan KB.

   (Koordinator dan Penyuluh KB) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya.
4. Inovasi untuk lebih memantapkan pendekatan pola asuh keluarga untuk pencegahan stunting.
5. Keberadaan UPTD PPA yang belum bisa di manfaatkan secara optimal sehubungan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk operasional layanan dan pendampingan pada perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhirini menjadi tantangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungandari

semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

7. Adanya MOU dengan pengadilan agama untuk memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin di bawah umur untuk mendapatkan edukasi calon pengantin. Untuk tahun 2025 Kabupaten Mojokerto telah memberikan dipendsasi sebanyak 274 terdiri dari 240 perempuan dan 34 laki – laki calon pengantin di bawah umur.

Rekapitulasi Asesment Calon Pengantin di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2025

NO	KECAMATAN	UMUR PERKAWINAN								JUMLAH PERKAWINAN
		< 15 TAHUN		16 TAHUN		17 TAHUN		18 TAHUN		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JATIREJO	0	3	1	2	0	5	1	11	23
2	GONDANG	0	0	0	2	0	6	0	9	17
3	PACET	0	1	0	3	0	5	3	8	20
4	TRAWAS	0	1	0	0	1	3	0	2	7
5	NGORO	0	2	0	3	0	3	0	12	20
6	KUTOREJO	0	1	0	4	0	4	1	4	14
7	PUNGGING	0	1	0	3	1	4	2	7	18
8	MOJOSARI	0	1	0	2	1	2	0	3	9
9	DLANGGU	0	0	0	1	1	5	1	5	13
10	BANGSAL	0	0	0	0	0	2	0	1	3
11	PURI	0	3	0	1	0	4	1	8	17
12	SOOKO	0	0	0	7	3	6	0	6	22
13	TROWULAN	0	0	0	2	0	1	1	2	6
14	JETIS	0	0	1	2	0	3	0	3	9
15	GEDEG	0	1	1	3	0	4	1	2	12
16	KEMLAGI	0	2	0	1	1	3	3	7	17
17	DAWARBLANDONG	0	0	0	4	0	1	1	7	13
18	MOJOANYAR	0	1	0	1	0	1	2	1	6
19	LAIN LAIN	0	1	1	4	1	8	4	9	28
	JUMLAH	0	18	4	45	9	70	21	107	274

Mojokerto, 30 Januari 2026
KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO

Dr. Bambang Wahyuadi, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989031009

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATENMOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Nuryadi, S.IP., M.M.
Jabatan: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua Bupati Mojokerto	Pihak Pertama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
Muhammad Albarraa	Sugeng Nuryadi, S.IP., M.M. Pembina Tingkat I/ IVb NIP 196810101989031008

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta keluarga berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya
		1.3	Prevalensi KB Aktif	80,50%
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,50%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,60 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%
		1.3	Index Profesionalitas ASN	85,50 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.553.435.525	APBD 2025
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 187.393.000	APBD 2025
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 98.000.000	APBD 2025
4	Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak	Rp. 26.000.000	APBD 2025
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 18.000.000	APBD 2025
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 75.000.000	APBD 2025
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.580.400.000	APBD 2025
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.198.500.000	APBD 2025
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 5.879.200.000	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Sugeng Nuryadi, S.IP., M.M.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 196810101989031008

2. Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATENMOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Bambang Wahyuadi, M.H
Jabatan: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua Bupati Mojokerto	Pihak Pertama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
Muhammad Albarraa	Dr. Bambang Wahyuadi, M.H Pembina Utama Muda NIP 196710201989031009

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	80,07
2	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	88,15
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	100%
4	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	100%
5	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	11,78
6	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.289.213.925	PAPBD 2025
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 174.709.100	PAPBD 2025
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 90.546.700	PAPBD 2025
4	Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak	Rp. 25.367.350	PAPBD 2025
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 51.410.050	PAPBD 2025
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 65.243.750	PAPBD 2025
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.572.368.800	PAPBD 2025
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.664.425.000	PAPBD 2025
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 6.015.915.000	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Dr. Bambang Wahyuadi, M.H
Pembina Utama Muda
NIP 196710201989031009

MATRIK RENCANA STRATEGIS DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 – 2025

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI : k e 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan

NO.	TUJUAN					SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2025	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2025	REALISASI 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Di dapat dari 3 komponen kunci : 1. Pelembagaan PUG 2. Penyelenggaraan PUG 3. Inovasi PUG	APE Madya	APE Nindya	APE Nindya	Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi di bidang PUG dan PUHA	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi perempuan dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan	
												Meningkatkan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan	

2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Berdasarkan 5 klaster : 1. Hak sipil dan kebebasan 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu ruang dan kegiatan budaya 5. Perlindunga khusus	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi di bidang PUG dan PUHA	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak	
3.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Prevalensi KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif : Jumlah PUS x 100 %	80,62%	80,50%	80,50%	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga	Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga	
												Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal	Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan	
												Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB	Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)	

4.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Presentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga : Jumlah Sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga x 100 %	72,92%	73,50%	89,86%	Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA)	Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	
5.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangka Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	-	84,60 (A)	85,62 (A)	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	
													Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	
6.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Presetasi Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat daerah : Jumlah Anggaran Perangkat Daerah x 100 %	-	96,50%	95,88%			
7.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya	-	85,50 (tinggi)	87,40 (tinggi)			

8.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,10	91,84	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan tersosisalisasi serta berkelanjutan	-	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi			

MATRIK RENCANA STRATEGIS DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 – 2029

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR
MISI : k e 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter, melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat

NO.	TUJUAN					SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2025	TARGET 2026	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2025	REALISASI P 2025	TARGET 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1.	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender yang Berkualitas	I Bangga		65,11	65,11	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Persentase Kepesertaan KB	(Jumlah Peserta Aktif (PA))/(Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)) x 100%	80,50%	80,50%	80,51%	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga	Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga	
												Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal	Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan	

												Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB	Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)	
2.	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender yang Berkualitas	I Bangga		65,11	65,11	Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi	(Jumlah Keluarga Resiko Stunting yang di Dampingi)/(Jumlah Keluarga Resiko Stunting) x 100%	89,45%	89,45%	89,46%	Melakukan Edukasi intensif tentang stunting dan pencegahannya	Serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan, rujukan dan fasilitasi pe,berian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses insformasi dan pelayanan kepada keluarga dan atau keluarga beresiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan serta calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor resiko stunting dan melakukan upaya untuk meminimalisir atau pencegahan pengarus dari faktor resiko stunting	

												Melakukan Kolaborasi dengan kader kesehatan dan posyandu	Terdapat Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluhuh Desa/Kelurahan dengan anggota yang terdiri dari bidan/tenaga kesehatan, kader PKK dan kader KB	
												Melakukan Pelatihan keterampilan hidup sehat dan pengelolaan keuangan	Memberikan sosialisasi pentingnya merubah prilaku hidup sehat	
												Malakukan Pendekatan keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi	Meminimalisir Gizi buruk dan praktik pemberian makan tidak tepat.	
3.	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender yang Berkualitas	I Bangga		65,11	65,11	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terselesaikan	(Jumlah Korban Yang Terselesaikan)/(Jumlah Korban) x 100%	100%	100%	100%	Melakukan sosialisasi keluarga sadar hukum terkait edukasi kepada masyarakat dalam masalah pengetahuan hukum	Peningkatan Akses dan Optimalisasi Layanan (Hilir)	
												Penguatan Payung Hukum dan Implementasi UU TPKS	Penguatan Penegakan Hukum (Implementasi UU TPKS) (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	

												Peningkatan Kapasitas dan Respons Aparat Penegak Hukum (APH)	Pencegahan Berbasis Masyarakat (Hulu) Fokus pada penyelesaian akar masalah seperti faktor ekonomi, pola asuh, budaya patriarki, dan edukasi terkait pernikahan anak.	
												Kolaborasi Lintas Sektor dan Masyarakat	Strategi di Tingkat Daerah, Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk UPTD PPA dan layanan pendukung korban	
4.	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender yang Berkualitas	I Bangga		65,11	65,11	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan	(Jumlah Korban Yang Terselesaikan)/(Jumlah Korban) x 100%	100%	100%	100%	Melakukan sosialisasi keluarga sadar hukum terkait edukasi kepada masyarakat dalam masalah pengetahuan hukum	Peningkatan Akses dan Optimalisasi Layanan (Hilir)	
												Penguatan Payung Hukum dan Implementasi UU TPKS	Penguatan Penegakan Hukum (Implementasi UU TPKS) (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	

												Peningkatan Kapasitas dan Respons Aparat Penegak Hukum (APH)	Pencegahan Berbasis Masyarakat (Hulu) Fokus pada penyelesaian akar masalah seperti faktor ekonomi, pola asuh, budaya patriarki, dan edukasi terkait pernikahan anak.	
												Kolaborasi Lintas Sektor dan Masyarakat	Strategi di Tingkat Daerah, Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk UPTD PPA dan layanan pendukung korban	
5.	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender yang Berkualitas	I Bangga		65,11	65,11	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	(Jumlah ARG Pada Belanja Operasional dan Modal APBD)/(Jumlah Seluruh Belanja Operasional dan Modal APBD) x 100%	11,78%	12,73%	12,74%	Penguatan Kelembagaan PUG Memastikan setiap K/L (Kementerian/Lembaga) memiliki payung hukum yang mengatur PUG dalam perencanaan, seperti Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Tim Focal Point PUG	Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarus Utamaan Gender	

													Surat Edaran Nomor 050/2800/416-201/2020 tentang Implementasi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	
6.	Terwujudnya Keluarga dan Pembangunan Gender yang Berkualitas	I Bangga		65,11	65,11	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	84,60	85,62	85,63	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	
													Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	

Pengukuran Kinerja E – 81 Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2025)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2026) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		12		13		14		15		16		22		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)(Nilai)					APE																DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender(%)		1.550.000.000,00		772.700.225,00	73,68	174.709.100,00	0,00	1.200.000,00	0,00	23.415.900,00	36,50	39.183.160,00	54.72	102547958	91,22	166.347.018,00		939.047.243,00		60,58	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender(PD)		750.000.000,00		102.205.292,00	57,00	16.575.000,00	0,00	1200000	0,00	500000	57,00	7607000	0,00	6568000	57,00	15.875.000,00		118.080.292,00		15,74	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1,00	16.575.000,00	0,20	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,40	7.607.000,00	0,40	6.568.000,00	1,00	15.875.000,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwirausaha(Orang)		300.000.000,00		103.497.186,00	40,00	108.334.100,00	0,00	0	0,00	21119228	40,00	31576160	0,00	50801798	40,00	103.497.186,00		206.994.372,00		69,00	DP2KBP2

4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1,00	108.334.100,00	0,00	0,00	0,05	21.119.228,00	0,45	31.576.160,00	0,50	50.801.798,00	1,00	103.497.186,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan(Lembaga)		500.000.000,00		566.997.747,00	25,00	49.800.000,00	0,00	0	0,00	1796672	25,00	0	0,00	45178160	25,00	46.974.832,00		613.972.579,00		122,79	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan(Lembaga)					3,00	49.800.000,00	0,00	0,00	0,10	1.796.672,00	1,00	0,00	1,90	45.178.160,00	3,00	46.974.832,00					DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan(%)		1.977.465.000,00		528.913.389,00	100,00	90.546.700,00	0,00	6.000.000,00	0,00	14.450.432,00	64,00	37.601.477,00	36	19925000	100,00	77.976.909,00		606.890.298,00		30,69	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO(Lembaga)		385.775.000,00		238.452.489,00	10,00	42.546.700,00	0,00	0	0,00	2450432	10,00	28601477	0,00	10925000	10,00	41.976.909,00		280.429.398,00		72,69	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1,00	42.546.700,00	0,00	0,00	0,05	2.450.432,00	0,70	28.601.477,00	0,25	10.925.000,00	1,00	41.976.909,00					DP2KBP2

3		[KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A/UPTD(Mitra/Jejaring)		1.091.690.000,00		270.885.500,00	12,00	48.000.000,00	0,00	6000000	0,00	12000000	12,00	9000000	0,00	9000000	12,00	36.000.000,00		306.885.500,00		28,11	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan(Orang)					5,00	48.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	9.000.000,00	1,00	9.000.000,00	5,00	36.000.000,00					DP2KBP2
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Kabupaten Layak Anak (KLA)(Nilai)					KLA															DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak(%)		500.000.000,00		72.433.689,00	100,00	25.367.350,00	0,00	4.135.000,00	0,00	5.596.128,00	78,00	10.086.161,00	22	4640000	100,00	24.457.289,00		96.890.978,00		19,38	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun(Buku)		500.000.000,00		72.433.689,00	1,00	25.367.350,00	0,00	4135000	0,00	5596128	1,00	10086161	0,00	4640000	1,00	24.457.289,00		96.890.978,00		19,38	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia(Dokumen)					1,00	25.367.350,00	0,25	4.135.000,00	0,10	5.596.128,00	0,45	10.086.161,00	0,20	4.640.000,00	1,00	24.457.289,00					DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak (%)		1.541.337.000,00		245.818.350,00	100,00	51.410.050,00	0,00	4.086.600,00	0,00	360.015,00	15,00	3.661.180,00	85	42022355	100,00	50.130.150,00		295.948.500,00		19,20	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto(Lembaga)		1.041.337.000,00		84.303.350,00	3,00	51.410.050,00	0,00	4086600	0,00	360015	3,00	3661180	0,00	42022355	3,00	50.130.150,00		134.433.500,00		12,91	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan					95,00	44.703.050,00	35,00	1.158.600,00	0,00	260.015,00	35,00	0,00	25,00	42.022.355,00	95,00	43.440.970,00					DP2KBP2

		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota(Orang)																				
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1,00	6.707.000,00	0,25	2.928.000,00	0,25	100.000,00	0,50	3.661.180,00	0,00	0,00	1,00	6.689.180,00				DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan(%)		2.952.445.000,00		488.672.280,00	100,00	65.243.750,00	0,00	9.202.400,00	0,00	20.235.000,00	65,00	13.150.000,00	35	9000000	100,00	51.587.400,00		540.259.680,00		18,30	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialilasi Pencegahan Perkawinan Anak(Orang)		285.775.000,00		139.539.980,00	25,00	7.380.550,00	0,00	0	0,00	6935000	25,00	0	0,00	0	25,00	6.935.000,00		146.474.980,00		51,26	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA(Orang)					15,00	7.380.550,00	0,00	0,00	0,00	6.935.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	6.935.000,00				DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan(Anak)		2.166.670.000,00		296.762.300,00	10,00	9.863.200,00	0,00	4202400	0,00	1300000	0,00	4150000	35,00	0	35,00	9.652.400,00		306.414.700,00		14,14	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan(Orang)					5,00	5.000.000,00	2,00	3.200.000,00	3,00	1.300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	5,00	5.000.000,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan(Layanan)					10,00	4.863.200,00	0,00	1.002.400,00	2,00	0,00	8,00	3.650.000,00	0,00	0,00	10,00	4.652.400,00				DP2KBP2

3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Penanganan Sosial(Orang)		500.000.000,00		52.370.000,00	3,00	48.000.000,00	0,00	5000000	0,00	12000000	3,00	9000000	0,00	9000000	3,00	35.000.000,00		87.370.000,00		17,47	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK(Kegiatan)					1,00	48.000.000,00	0,25	5.000.000,00	0,05	12.000.000,00	0,30	9.000.000,00	0,40	9.000.000,00	1,00	35.000.000,00					DP2KBP2
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prevalensi KB Aktif(%)					80,35															DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan(%)		2.360.000.000,00		4.830.876.273,00	100,00	1.572.368.800,00	0,00	232.297.984,00	0,00	329.871.000,00	66,00	477.817.986,00	34	522824475	100,00	1.562.811.445,00		6.393.687.718,00		270,92	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK(Orang)		1.010.000.000,00		242.278.584,00	100,00	75.582.200,00	0,00	2408384	0,00	13315000	100,00	59147000	0,00	283500	100,00	75.153.884,00		317.432.468,00		31,43	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota(Dokumen)					1,00	66.899.700,00	0,00	1.008.384,00	0,10	7.705.000,00	0,90	57.647.000,00	0,00	283.500,00	1,00	66.643.884,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal(Kegiatan)					1,00	8.682.500,00	0,20	1.400.000,00	0,50	5.610.000,00	0,30	1.500.000,00	0,00	0,00	1,00	8.510.000,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Program Bangga Kencana (Dokumen)		1.350.000.000,00		4.588.597.689,00	1,00	1.496.786.600,00	0,00	229889600	0,00	316556000	1,00	418670986	0,00	522540975	1,00	1.487.657.561,00		6.076.255.250,00		450,09	DP2KBP2

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga(Laporan)					1,00	60.000.000,00	0,50	27.123.600,00	0,00	3.546.000,00	0,25	15.470.986,00	0,25	5.340.975,00	1,00	51.481.561,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga(Laporan)					1,00	242.400.000,00	0,00	0,00	0,05	15.000.000,00	0,45	106.200.000,00	0,50	121.200.000,00	1,00	242.400.000,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB(Dokumen)					1,00	1.188.000.000,00	0,15	198.000.000,00	0,15	297.000.000,00	0,40	297.000.000,00	0,30	396.000.000,00	1,00	1.188.000.000,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk(Unit)					18,00	6.386.600,00	9,00	4.766.000,00	7,00	1.010.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	18,00	5.776.000,00				DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana(%)		45.847.550.000,00		26.802.381.940,00	80,30	6.664.425.000,00	0,00	192.099.699,00	0,00	1.716.598.473,00	56,00	1.847.873.506,00	24.06	2572039956	80,06	6.328.611.634,00		33.130.993.574,00		72,26	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program Bangga Kencana(media)		16.206.050.000,00		5.407.214.189,00	2,00	1.622.225.000,00	0,00	146387225	0,00	510522725	2,00	410179505	0,00	521847644	2,00	1.588.937.099,00		6.996.151.288,00		43,17	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK(Laporan)					1,00	5.225.000,00	0,00	0,00	0,50	2.375.000,00	0,25	1.350.000,00	0,25	585.654,00	1,00	4.310.654,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembanguna					34,00	882.000.000,00	4,00	117.186.500,00	6,00	235.165.500,00	14,00	240.189.500,00	10,00	284.686.900,00	34,00	877.228.400,00				DP2KBP2

			n Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Laporan)																				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(Laporan)					10,00	360.000.000,00	1,00	7.200.000,00	1,00	100.708.200,00	4,00	107.908.200,00	4,00	143.877.600,00	10,00	359.694.000,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang(Dokumen)					2,00	125.000.000,00	0,75	18.700.725,00	0,25	52.815.625,00	0,50	24.281.805,00	0,50	22.931.490,00	2,00	118.729.645,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja(Organisasi)					1,00	250.000.000,00	0,13	3.300.000,00	0,38	119.458.400,00	0,13	36.450.000,00	0,38	69.766.000,00	1,00	228.974.400,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan honorarium(Orang)		7.087.500.000,00		10.795.721.251,00	1.828,00	2.480.550.000,00	0,00	40312474	0,00	555319748	1.828,00	348724001	0,00	1487310312	1.828,00	2.431.666.535,00		13.227.387.786,00		186,63	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan					1.828,00	1.070.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	1.039.209.600,00	1.828,00	1.039.209.600,00					DP2KBP2

		Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(Orang)																				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB(Organisasi)					1,00	1.247.900.000,00	0,00	14.812.474,00	0,50	505.819.748,00	0,50	312.724.001,00	0,00	412.100.712,00	1,00	1.245.456.935,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)(Laporan)					1,00	162.000.000,00	0,25	25.500.000,00	0,25	49.500.000,00	0,20	36.000.000,00	0,30	36.000.000,00	1,00	147.000.000,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes KB yang mendapatkan distribusi alokon(Faskes)		16.990.640.000,00		8.179.625.000,00	50,00	2.024.050.000,00	0,00	5400000	0,00	616356000	50,00	881737000	0,00	269165000	50,00	1.772.658.000,00		9.952.283.000,00		58,58	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)					1,00	30.000.000,00	0,10	5.400.000,00	0,40	6.450.000,00	0,10	5.260.000,00	0,40	6.075.000,00	1,00	23.185.000,00					DP2KBP2

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(Orang)					3.555,00	1.943.050.000,00	0,00	0,00	620,00	591.126.000,00	2.100,00	855.097.000,00	500,00	252.540.000,00	3.220,00	1.698.763.000,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)					2,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,75	18.780.000,00	0,75	21.380.000,00	0,50	10.550.000,00	2,00	50.710.000,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)(PPKBD/Sub)		5.563.360.000,00		2.419.821.500,00	1.828,00	537.600.000,00	0,00	0	0,00	34400000	1.828,00	207233000	0,00	293717000	1.828,00	535.350.000,00		2.955.171.500,00		53,12	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Kampung)					96,00	537.600.000,00	0,00	0,00	0,00	34.400.000,00	44,00	207.233.000,00	52,00	293.717.000,00	96,00	535.350.000,00					DP2KBP2
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(%)					72,65															DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif(%)		13.492.600.000,00		21.122.609.274,00	96,96	6.015.915.000,00	0,00	31.196.300,00	0,00	1.151.322.000,00	58,00	2.275.460.000,00	39.08	2498496050	97,08	5.956.474.350,00		27.079.083.624,00		200,70	DP2KBP2

3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan(Kelompok)		12.492.600.000,00		9.676.768.774,00	46,00	326.715.000,00	0,00	31196300	0,00	13482000	0,00	0	46,00	222816050	46,00	267.494.350,00		9.944.263.124,00		79,60	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)(Laporan / Dokumen)					1,00	10.000.000,00	0,50	5.157.500,00	0,50	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.732.500,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia(Unit)					10,00	278.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	220.396.050,00	10,00	220.396.050,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)(Orang)					25,00	38.300.000,00	13,00	26.038.800,00	10,00	8.907.000,00	0,00	0,00	2,00	2.420.000,00	25,00	37.365.800,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting yang Terdampingi(Orang)		1.000.000.000,00		11.445.840.500,00	11.000,00	5.689.200.000,00	0,00	0	0,00	1137840000	11.000,00	2275460000	0,00	2275680000	11.000,00	5.688.980.000,00		17.134.820.500,00		1.713,48	DP2KBP2

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)(laporan)					862,00	2.586.000.000,00	0,00	0,00	0,00	517.200.000,00	550,00	1.034.300.000,00	312,00	1.034.400.000,00	862,00	2.585.900.000,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan(laporan)					1,00	3.103.200.000,00	0,00	0,00	0,00	620.640.000,00	0,60	1.241.160.000,00	0,40	1.241.280.000,00	1,00	3.103.080.000,00					DP2KBP2
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (Inovasi)					1,00															DP2KBP2
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Indeks Profesionalitas ASN(Nilai)					86,25 (Tinggi)															DP2KBP2
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					84, 65 (A)															DP2KBP2
2		[PROGRAM] 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi(Inovasi)		31.547.116.950,00		20.655.930.302,00	1,00	5.289.213.925,00	0,00	1.208.628.290,00	0,00	1.406.537.255,00	1,00	1.051.379.958,00	0	1242593089	1,00	4.909.138.592,00		25.565.068.894,00		81,04	DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		75.000.000,00		42.066.488,00	90,00	6.100.000,00	0,00	2775000	0,00	0	85,00	2600000	5,00	412088	90,00	5.787.088,00		47.853.576,00		63,80	DP2KBP2

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2,00	3.750.000,00	1,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2,00	3.575.000,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					1,00	2.350.000,00	0,25	800.000,00	0,10	0,00	0,40	1.000.000,00	0,25	412.088,00	1,00	2.212.088,00				DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		27.584.004.950,00		18.624.993.795,00	89,00	4.766.052.000,00	0,00	1133064533	0,00	1308186588	60,72	923757934	35,16	1037577425	95,88	4.402.586.480,00		23.027.580.275,00		83,48	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					30,00	4.766.052.000,00	30,00	1.133.064.533,00	0,00	1.308.186.588,00	0,00	923.757.934,00	0,00	1.037.577.425,00	30,00	4.402.586.480,00				DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		1.290.000.000,00		714.956.499,00	90,00	259.366.225,00	0,00	22202028	0,00	45464053	80,00	46216720	10,00	140736899	90,00	254.619.700,00		969.576.199,00		75,16	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9,00	145.902.100,00	0,00	0,00	2,00	18.743.000,00	4,00	18.550.000,00	3,00	105.478.796,00	9,00	142.771.796,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					164,00	12.000.000,00	55,00	2.695.000,00	0,00	570.000,00	70,00	5.390.000,00	39,00	3.105.000,00	164,00	11.760.000,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4,00	14.761.100,00	1,00	6.111.600,00	1,00	0,00	1,00	6.256.720,00	1,00	2.388.684,00	4,00	14.757.004,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					6,00	7.180.800,00	1,00	1.710.000,00	1,00	1.140.000,00	2,00	1.770.000,00	2,00	2.370.000,00	6,00	6.990.000,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4,00	33.721.825,00	0,00	0,00	2,00	15.842.435,00	0,00	0,00	2,00	17.510.419,00	4,00	33.352.854,00				DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12,00	4.000.000,00	1,00	1.112.500,00	2,50	530.000,00	7,50	1.780.000,00	1,00	534.000,00	12,00	3.956.500,00				DP2KBP2

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					130,00	41.800.400,00	15,00	10.572.928,00	35,00	8.638.618,00	50,00	12.470.000,00	30,00	9.350.000,00	130,00	41.031.546,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1.283.111.600,00		452.017.039,00	90,00	115.746.991,00	0,00	24924229	0,00	26330312	70,00	27536322	20,00	30118671	90,00	108.909.534,00		560.926.573,00		43,72	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12,00	61.894.991,00	3,00	11.999.749,00	1,00	13.405.832,00	4,00	14.611.842,00	4,00	17.194.191,00	12,00	57.211.614,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12,00	53.852.000,00	3,00	12.924.480,00	2,00	12.924.480,00	4,00	12.924.480,00	3,00	12.924.480,00	12,00	51.697.920,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik(%)		1.250.000.000,00		775.681.481,00	90,00	141.948.709,00	0,00	25662500	0,00	26556302	80,00	51268982	10,00	33748006	90,00	137.235.790,00		912.917.271,00		73,03	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)					183,00	116.348.709,00	3,00	22.357.500,00	70,00	16.800.000,00	70,00	47.321.495,00	40,00	25.787.997,00	183,00	112.266.992,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1,00	11.990.000,00	0,00	0,00	0,75	8.426.302,00	0,10	1.932.487,00	0,15	1.190.009,00	1,00	11.548.798,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					18,00	13.610.000,00	5,00	3.305.000,00	0,00	1.330.000,00	4,00	2.015.000,00	13,00	6.770.000,00	22,00	13.420.000,00					DP2KBP2

			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(%)					84,42		0		0,00		85,62		0							
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		75.000.000,00		42.066.488,00	90,00	6.100.000,00	0,00	2775000	0,00	0	85,00	2600000	5,00	412088	90,00	5.787.088,00		47.853.576,00		63,80	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2,00	3.750.000,00	1,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2,00	3.575.000,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					1,00	2.350.000,00	0,25	800.000,00	0,10	0,00	0,40	1.000.000,00	0,25	412.088,00	1,00	2.212.088,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		27.584.004.950,00		18.624.993.795,00	89,00	4.766.052.000,00	0,00	1133064533	0,00	1308186588	60,72	923757934	35,16	1037577425	95,88	4.402.586.480,00		23.027.580.275,00		83,48	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					30,00	4.766.052.000,00	30,00	1.133.064.533,00	0,00	1.308.186.588,00	0,00	923.757.934,00	0,00	1.037.577.425,00	30,00	4.402.586.480,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		1.290.000.000,00		714.956.499,00	90,00	259.366.225,00	0,00	22202028	0,00	45464053	80,00	46216720	10,00	140736899	90,00	254.619.700,00		969.576.199,00		75,16	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9,00	145.902.100,00	0,00	0,00	2,00	18.743.000,00	4,00	18.550.000,00	3,00	105.478.796,00	9,00	142.771.796,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					164,00	12.000.000,00	55,00	2.695.000,00	0,00	570.000,00	70,00	5.390.000,00	39,00	3.105.000,00	164,00	11.760.000,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4,00	14.761.100,00	1,00	6.111.600,00	1,00	0,00	1,00	6.256.720,00	1,00	2.388.684,00	4,00	14.757.004,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					6,00	7.180.800,00	1,00	1.710.000,00	1,00	1.140.000,00	2,00	1.770.000,00	2,00	2.370.000,00	6,00	6.990.000,00					DP2KBP2

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4,00	33.721.825,00	0,00	0,00	2,00	15.842.435,00	0,00	0,00	2,00	17.510.419,00	4,00	33.352.854,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12,00	4.000.000,00	1,00	1.112.500,00	2,50	530.000,00	7,50	1.780.000,00	1,00	534.000,00	12,00	3.956.500,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					130,00	41.800.400,00	15,00	10.572.928,00	35,00	8.638.618,00	50,00	12.470.000,00	30,00	9.350.000,00	130,00	41.031.546,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1.283.111.600,00		452.017.039,00	90,00	115.746.991,00	0,00	24924229	0,00	26330312	70,00	27536322	20,00	30118671	90,00	108.909.534,00		560.926.573,00		43,72	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12,00	61.894.991,00	3,00	11.999.749,00	1,00	13.405.832,00	4,00	14.611.842,00	4,00	17.194.191,00	12,00	57.211.614,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12,00	53.852.000,00	3,00	12.924.480,00	2,00	12.924.480,00	4,00	12.924.480,00	3,00	12.924.480,00	12,00	51.697.920,00					DP2KBP2
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik(%)		1.250.000.000,00		775.681.481,00	90,00	141.948.709,00	0,00	25662500	0,00	26556302	80,00	51268982	10,00	33748006	90,00	137.235.790,00		912.917.271,00		73,03	DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)					183,00	116.348.709,00	3,00	22.357.500,00	70,00	16.800.000,00	70,00	47.321.495,00	40,00	25.787.997,00	183,00	112.266.992,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1,00	11.990.000,00	0,00	0,00	0,75	8.426.302,00	0,10	1.932.487,00	0,15	1.190.009,00	1,00	11.548.798,00					DP2KBP2
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan					18,00	13.610.000,00	5,00	3.305.000,00	0,00	1.330.000,00	4,00	2.015.000,00	13,00	6.770.000,00	22,00	13.420.000,00					DP2KBP2

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)																					
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)					96,55																DP2KBP2
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																	99.81 %	24.036.673 .379,00					
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4																			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kegiatan di laksanakan sesuai anggaran yang di rencanakan untuk kegiatan yang tidak di perlakukan efisiensi anggaran	Komitmen dan kerja sama antar bidang yang solid, kualitas SDM pegawai yang kompeten di bidangnya dan pembagian tupoksi sesuai dengan kinerjanya, dan kerjasama antar lintas sektor, mitra kerja, akademisi, kepanjangan tangan DP2KBP2 (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)	Pembagian anggaran kas sesuai yang di rencanakan, Komitmen dan kerja sama antar bidang yang solid, kualitas SDM pegawai yang kompeten di bidangnya, pembagian tupoksi sesuai dengan kinerjanya dan kerjasama dengan mitra atau lintas sektor yang harmonis.	Pembagian anggaran kas sesuai yang di rencanakan, Komitmen dan kerja sama antar bidang yang solid, kualitas SDM pegawai yang kompeten di bidangnya, pembagian tupoksi sesuai dengan kinerjanya dan kerjasama dengan mitra atau lintas sektor yang harmonis dan dan kerjasama antar lintas sektor, mitra kerja, akademisi, kepanjangan tangan DP2KBP2 (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)																	

	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya beberapa efisiensi anggaran sehingga mengakibatkan perencanaan kinerja yang tidak sesuai dengan rencana aksi/anggaran kas yang telah di tetapkan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia, kurang disiplinnya karyawan, tugas pokok dan fungsi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan sarpras yang kurang memadai	Adanya kegiatan DAK Non fisik yang belum terelisasi karena adanya perubahan Juknis penggunaan dana DAK dan sesuai jadwal perencanaan akan dimulai setelah PAPBD 2025 disahkan dan ditargetkan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia, kurang disiplinnya karyawan, tugas pokok dan fungsi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan sarpras yang kurang memadai dan Adanya kegiatan DAK Non fisik yang belum terelisasi karena adanya perubahan Juknis penggunaan dana DAK dan sesuai jadwal perencanaan akan dimulai setelah PAPBD 2025 disahkan dan ditargetkan																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	kegiatan agar di maksimalkan sesuai anggaran yang tersedia	terdapat beberapa kegiatan yang belum selesai di laksanakan sesuai target, sehingga agar di laksankana pada triwulan III	1. Kegiatan yang berasal dari DAK agar dapat di laksanakan sebelum akhir desember 2025; 2. masih ada kegiatan yang belum sesuai target kinerja, mohon agar di koordinasikan dengan bidang-bidang terkait target pada masing-masing sub kegiatan yang belum tercapai sesuai target	Untuk kegiatan DAK tahun 2026 agar dapat di uslkan dan di koordinasikan dengan Tim DAK dari Bappeda																	

	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	1. Agar mengacuh dengan Renstra 2025-2029; 2. target dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan target kinerja yang akan di capai	1. target kinerja dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan mengacuh dengan Renstra 2025-2029;	1. Dalam penyusunan Renja 2026 agar di sesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renstra dan yang sudah di input pada SIPD; 2. Agar di optimalkan anggaran tahun 2026 dan hasil pemantauan hasil kienrja tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memastikan keterpaduan antara capaian kinerja dan target pembangunan daerah.	Target kinerja agar di sesuaikan dengan target anggaran kas																		